

LAPORAN KEUANGAN

**BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA BONTANG**

T.A. 2024 AUDITED



JL. AWANG LONG NO. 2 KEL. BONTANG BARU, KEC. BONTANG UTARA, KOTA BONTANG

TELP: (0548) 26066 | FAX: (0548) 27706

WEBSITE: [HTTPS://BONTANGKOTA.BPS.GO.ID](https://bontangkota.bps.go.id) | EMAIL: BPS6474@BPS.GO.ID

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara bahwa Menteri/Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran/Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan laporan keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang dipimpinnya.

BPS Kota Bontang adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Badan Pusat Statistik yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan BPS Kota Bontang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat dalam Pemerintahan. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada BPS Kota Bontang. Di samping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Bontang, 5 Mei 2025
Kepala BPS Kota Bontang,

Ir. Nur Wahid M.M.
NIP.196905241993021001

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	v
Indeks Singkatan	vii
Pernyataan Tanggung Jawab	viii
I. Ringkasan	1
II. Laporan Realisasi Anggaran	3
III. Neraca	4
IV. Laporan Operasional	6
V. Laporan Perubahan Ekuitas	7
VI. Catatan Atas Laporan Keuangan	8
A. Penjelasan Umum	8
A.1 Profil Dan Kebijakan Teknis	8
A.2 Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	10
A.3 Basis Akuntansi	11
A.4 Dasar Pengukuran	11
A.5 Kebijakan Akuntansi	11
B Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Realisasi Anggaran	17
B.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	21
B.2 Belanja Negara	24
B.3 Belanja Pegawai	29
B.4 Belanja Barang	31
B.5 Belanja Modal	33
B.5.1 Belanja Modal Peralatan Dan Mesin	33
C. Penjelasan Atas Pos-pos Neraca	35
C.1 Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	35
C.2 Persediaan	35
C.3 Tanah	39
C.4 Peralatan Dan Mesin	40
C.5 Gedung Dan Bangunan	42
C.6 Aset Tetap Lainnya	43
C.7 Akumulasi Penyusutan	44
C.8 Aset Tak Berwujud	44
C.9 Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	45
C.10 Aset Lain-lain	47
C.11 Akumulasi Penyusutan/amortisasi Aset Lainnya	49
C.12 Utang Kepada Pihak Ketiga	50

C.13 Ekuitas	52
D. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Operasional	53
D.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	53
D.2 Beban Pegawai	54
D.3 Beban Persediaan	55
D.4 Beban Barang Dan Jasa	58
D.5 Beban Pemeliharaan	63
D.6 Beban Perjalanan Dinas	63
D.7 Beban Penyusutan Dan Amortisasi	64
D.8 Kegiatan Non Operasional	65
E. Penjelasan Atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	67
E.1 Ekuitas Awal	67
E.2 Surplus/defisit-lo	67
E.4 Transaksi Antar Entitas	67
E.4.1 Diterima Dari Entitas Lain (ddel)/ditagihkan Ke Entitas Lain (dkel)	68
E.4.2 Transfer Masuk/transfer Keluar	69
E.5 Ekuitas Akhir	70
F. Pengungkapan Lainnya	71

DAFTAR TABEL

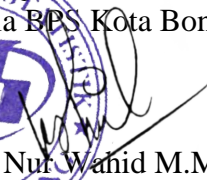
Tabel	Uraian Tabel	Halaman
Tabel 1	Rincian Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualitas Piutang	13
Tabel 2	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap	15
Tabel 3	Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud	16
Tabel 4	Rincian Anggaran	17
Tabel 4A	Perubahan Anggaran Belanja Berdasarkan Program	18
Tabel 4B	Perubahan Anggaran Belanja Berdasarkan Sumber Dana	19
Tabel 5	Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan	21
Tabel 6	Perbandingan Realisasi Pendapatan	23
Tabel 7	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja	24
Tabel 7A	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program	25
Tabel 7B	Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana	26
Tabel 8	Perbandingan Realisasi Belanja	27
Tabel 9	Perbandingan Belanja Pegawai	29
Tabel 10	Perbandingan Belanja Barang	31
Tabel 11	Perbandingan Realisasi Belanja Modal	33
Tabel 12	Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin	34
Tabel 13	Rincian Belanja Dibayar di Muka	35
Tabel 14	Rincian Persediaan	36
Tabel 15	Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	44
Tabel 16	Rincian Aset Tak berwujud	45
Tabel 16A	Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya	46
Tabel 16B	Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya	46
Tabel 17	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya	49
Tabel 17A	Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	50
Tabel 18	Rincian Utang Pada Pihak Ketiga	51
Tabel 19	Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak	53
Tabel 20	Perbandingan Nilai LO dan LRA Pendapatan Negara Bukan Pajak	54
Tabel 21	Rincian Beban Pegawai	54
Tabel 22	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pegawai	56
Tabel 23	Rincian Beban Persediaan	57
Tabel 24	Rincian Beban Barang dan Jasa	58
Tabel 25	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Barang dan Jasa	60
Tabel 26	Rincian Beban Pemeliharaan	62
Tabel 27	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pemeliharaan	63
Tabel 28	Rincian Beban Perjalanan Dinas	63


Tabel 29	Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Perjalanan Dinas	64
Tabel 30	Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi	65
Tabel 31	Rincian Kegiatan Non Operasional	65
Tabel 32	Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas	67
Tabel 33	Rincian Transfer Masuk	69

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan BPS Kota Bontang yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bontang, 5 Mei 2025
Kepala BPS Kota Bontang,

Ir. Nur Wahid M.M.
NIP. 196905241993021001



INDEKS SINGKATAN

APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
BPS	:	Badan Pusat Statistik
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
LKKL	:	Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
CaLK	:	Catatan atas Laporan Keuangan
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	:	Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAIBA	:	Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua
SAK	:	Sistem Akuntansi Keuangan
SIMAK BMN	:	Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
LO	:	Laporan Operasional
LPE	:	Laporan Perubahan Ekuitas
KUN	:	Kas Umum Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
TP	:	Tuntutan Perbendaharaan
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
KDP	:	Konstruksi Dalam Pengerjaan
UP	:	Uang Persediaan
SSBP	:	Surat Setoran Bukan Pajak
SATKER	:	Satuan Kerja
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
PPAKP	:	Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah
RKP	:	Rencana Kerja Pemerintah
RPJM	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah
RENSTRA	:	Rencana Strategis

I. RINGKASAN LAPORAN KEUANGAN

Berdasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan BPS Kota Bontang Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi:

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024.

Realisasi Pendapatan Negara Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 adalah berupa Pendapatan Negara Bukan Pajak sebesar Rp1.921.652 atau mencapai 99,98 persen dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp1.922.000.

Realisasi Belanja Negara Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.892.697.247 atau mencapai 87,98 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp5.561.153.000.

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada 31 Desember 2024.

Neraca yang disajikan adalah hasil proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 232/PMK.05/2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

Nilai Aset per 31 Desember 2024 dicatat dan disajikan sebesar Rp4.875.114.570 yang terdiri dari: Aset Lancar sebesar Rp64.000.814 Piutang Jangka Panjang (neto) sebesar Rp0,00 Aset Tetap (neto) sebesar Rp4.783.530.586 dan Aset Lainnya (neto) sebesar Rp27.583.170.

Nilai Kewajiban dan Ekuitas masing-masing sebesar Rp138.280.788 dan Rp4.736.833.782.

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus/defisit dari operasi, surplus/defisit dari kegiatan nonoperasional, surplus/defisit sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus/defisit-LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pendapatan-LO untuk periode sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.921.652,

sedangkan jumlah beban dari kegiatan operasional adalah sebesar Rp5.195.636.018 sehingga terdapat Defisit dari Kegiatan Operasional senilai Rp5.193.714.366. Surplus Kegiatan Non Operasional dan Defisit Pos-pos Luar Biasa masing-masing sebesar Rp1.280.000 dan sebesar Rp0 sehingga entitas mengalami Defisit-LO sebesar Rp5.192.434.366.

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas pada tanggal 01 Januari 2024 adalah sebesar Rp4.972.554.364 dikurangi Defisit-LO sebesar Rp5.192.434.366 ditambah dengan koreksi-koreksi senilai Rp0 dan Transaksi Antar Entitas sebesar Rp4.956.713.784 sehingga Ekuitas entitas pada tanggal 31 Desember 2024 adalah senilai Rp4.736.833.782.

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 disusun dan disajikan berdasarkan basis kas. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 disusun dan disajikan dengan basis akrual.

II. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

BPS Kota Bontang LAPORAN REALISASI ANGGARAN Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2024		% terhadap Anggaran	31 Desember 2023
		ANGGARAN	REALISASI		REALISASI
PENDAPATAN					
Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1	1.922.000	1.921.652	99,98	1.951.640
JUMLAH PENDAPATAN		1.922.000	1.921.652	99,98	1.951.640
Belanja Negara	B.2	5.561.153.000	4.892.697.247	87,98	6.181.068.269
Belanja Pegawai	B.3	3.008.600.000	2.991.647.263	99,44	2.720.562.954
Belanja Barang	B.4	2.452.553.000	1.805.049.984	73,60	2.807.525.315
Belanja Modal	B.5	100.000.000	96.000.000	96,00	652.980.000
JUMLAH BELANJA		5.561.153.000	4.892.697.247	87,98	6.181.068.269

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

III. NERACA

BPS Kota Bontang
NERACA
Per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
ASET			
ASET LANCAR			
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1	12.379.563	3.522.137
Persediaan	C.2	51.621.251	65.313.890
Jumlah Aset Lancar		64.000.814	68.836.027
PIUTANG JANGKA PANJANG			
Jumlah Piutang Jangka Panjang		0	0
ASET TETAP			
Tanah	C.3	1.504.778.000	1.504.778.000
Peralatan Dan Mesin	C.4	2.235.895.972	2.337.354.471
Gedung Dan Bangunan	C.5	2.874.089.197	2.874.089.197
Aset Tetap Lainnya	C.6	102.281.121	102.281.121
Akumulasi Penyusutan	C.7	(1.933.513.704)	(1.814.526.840)
Jumlah Aset Tetap		4.783.530.586	5.003.975.949
ASET LAINNYA			
Aset Tak Berwujud	C.8	25.700.000	25.700.000
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	C.9	27.583.170	0
Aset Lain-lain	C.10	197.458.499	0
Akumulasi Penyusutan/amortisasi Aset Lainnya	C.11	(223.158.499)	(25.700.000)
Jumlah Aset Lainnya		27.583.170	0
JUMLAH ASET		4.875.114.570	5.072.811.976
KEWAJIBAN			

KEWAJIBAN JANGKA PENDEK			
Utang kepada Pihak Ketiga	C.12	138.280.788	100.257.612
JUMLAH KEWAJIBAN		138.280.788	100.257.612
EKUITAS			
Ekuitas	C.13	4.736.833.782	4.972.554.364
JUMLAH EKUITAS		4.736.833.782	4.972.554.364
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS		4.875.114.570	5.072.811.976

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

IV. LAPORAN OPERASIONAL

BPS Kota Bontang LAPORAN OPERASIONAL Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
KEGIATAN OPERASIONAL			
PENDAPATAN			
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	D.1	1.921.652	1.951.640
JUMLAH PENDAPATAN		1.921.652	1.951.640
BEBAN			
Beban Pegawai	D.2	2.999.680.269	2.716.789.996
Beban Persediaan	D.3	164.669.839	198.531.420
Beban Barang dan Jasa	D.4	1.171.617.843	1.798.688.395
Beban Pemeliharaan	D.5	71.101.972	125.190.678
Beban Perjalanan Dinas	D.6	472.120.732	781.499.633
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D.7	316.445.363	299.961.582
JUMLAH BEBAN		5.195.636.018	5.920.661.704
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL		(5.193.714.366)	(5.918.710.064)
KEGIATAN NON OPERASIONAL			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	D.8	1.280.000	0
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	29.812.848
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL		1.280.000	(29.812.848)
SURPLUS/DEFISIT		(5.192.434.366)	(5.948.522.912)

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

V. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

BPS Kota Bontang
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	CATATAN	31 Desember 2024	31 Desember 2023
Ekuitas awal	E.1	4.972.554.364	4.670.320.299
Surplus/defisit-LO	E.2	(5.192.434.366)	(5.948.522.912)
Transaksi Antar Entitas	E.4	4.956.713.784	6.250.756.977
Diterima dari entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)	E.4.1	4.890.775.595	6.179.116.629
Transfer Masuk/Transfer Keluar	E.4.2	65.938.189	71.640.348
Kenaikan/Penurunan Ekuitas		(235.720.582)	302.234.065
Ekuitas Akhir	E.5	4.736.833.782	4.972.554.364

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan

A. PENJELASAN UMUM

Entitas dan Rencana Strategis **A.1. Profil dan Kebijakan Teknis BPS Kota Bontang**

Rencana
Strategis

Badan Pusat Statistik (BPS) adalah institusi pemerintah yang memiliki kewenangan melakukan kegiatan statistik berupa sensus dan survei, untuk menghasilkan data dan statistik yang dibutuhkan baik oleh pemerintah, swasta, maupun masyarakat pada umumnya sesuai Undang-undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1999.

Sebagai rujukan dalam perencanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap hasil-hasil pembangunan, penyediaan data statistik yang berkualitas menjadi sangat menentukan karena akan berdampak kepada efektifitas pengambilan keputusan yang dilakukan. Oleh karena itu, diperlukan perencanaan yang baik untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang tepat dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi BPS.

Untuk menyongsong pembangunan nasional jangka menengah tahun 2020-2024, BPS menyusun Rencana Strategis yang mencerminkan upaya peningkatan dan kemampuan BPS menyediakan data statistik yang berkualitas, serta upaya untuk menjalankan perannya- sebagai pembina dan koordinator kegiatan statistik dalam kerangka pembangunan Sistem Statistik Nasional (SSN) secara lebih efektif.

Rencana Strategis Badan Pusat Statistik (Renstra BPS) tahun 2020-2024, disusun berlandaskan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik dan RPJM Nasional Tahun 2020-2024, serta memperhatikan masukan dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Dalam mencapai tujuannya, BPS memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:
Visi BPS:

"Penyedia Data Statistik Berkualitas untuk Indonesia Maju,"

("Provider of Qualified Statistical Data for Advanced Indonesia")

Misi BPS:

1. Menyediakan statistik berkualitas yang berstandar nasional dan internasional;
2. Membina K/L/D/I melalui Sistem Statistik Nasional yang berkesinambungan;
3. Mewujudkan pelayanan prima di bidang statistik untuk terwujudnya Sistem Statistik Nasional; dan
4. Membangun SDM yang unggul dan adaptif berlandaskan nilai profesionalisme, integritas dan amanah.

Melalui visi dan misi tersebut, BPS memiliki aspirasi untuk mencapai tujuan strategis. Tujuan strategis ini mencerminkan fokus perubahan yang akan dilakukan oleh BPS dalam periode Renstra 2020-2024, yakni bahwa BPS berupaya terus menerus untuk meningkatkan:

1. Menyediakan data statistik untuk dimanfaatkan sebagai dasar pembangunan.
2. Meningkatkan kolaborasi, integrasi, sinkronisasi, dan standarisasi dalam penyelenggaraan SSN.
3. Meningkatkan pelayanan prima dalam penyelenggaraan SSN.
4. Penguatan tata kelola kelembagaan dan reformasi birokrasi.

Untuk mencapai tujuan strategis tersebut diwadahi dalam sejumlah program, yakni:

1. Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik (PPIS).

Program teknis BPS ini bertujuan untuk menyediakan informasi statistik melalui kegiatan pengumpulan data, pengolahan data, pengkajian dan analisis statistik, serta diseminasi data dan informasi statistik secara terus menerus guna menjamin kesinambungan penyediaan data statistik yang lengkap, akurat, dan tepat waktu di bidang sosial budaya, ekonomi, kependudukan, dan lingkungan.

2. Program Dukungan Manajemen BPS (Dukman).

Program generik BPS ini bertujuan untuk memberi dukungan manajemen dan kelancaran pelaksanaan kegiatan teknis di bidang penyediaan data dan informasi statistik yang berkualitas. Dasar kebijaksanaan dalam program ini diarahkan untuk:

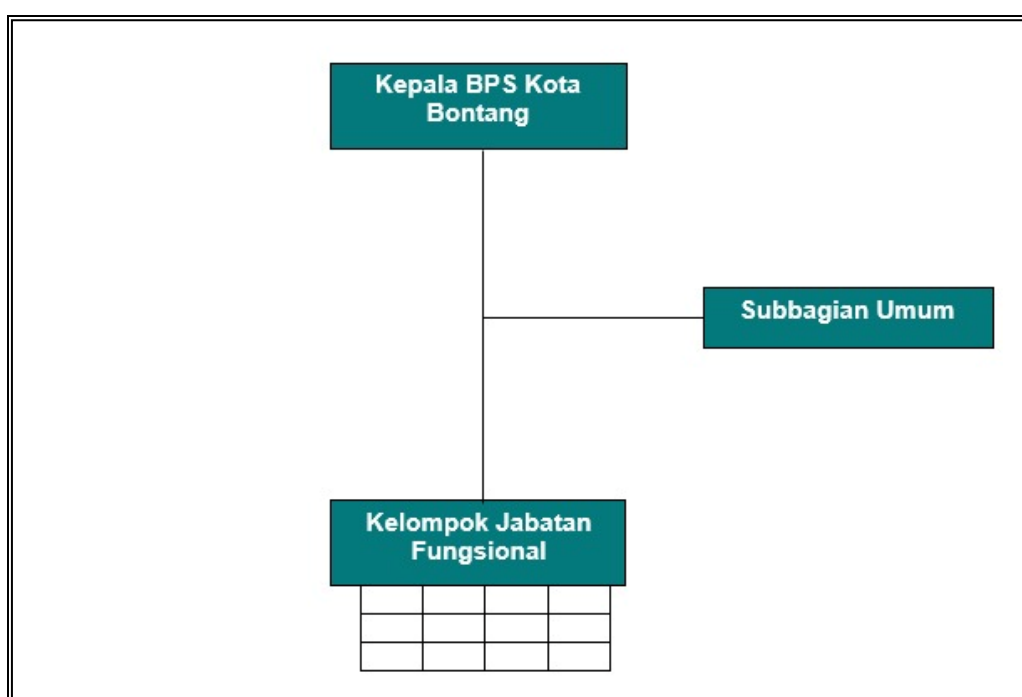
1. Kegiatan peningkatan kapasitas SDM statistik yang unggul melalui sekolah kedinasan dan pusat pendidikan pelatihan;
2. Kegiatan operasional penyelenggaraan lembaga seperti perencanaan program dan kegiatan, pemantauan dan evaluasi kegiatan, penyediaan alokasi gaji pegawai, dan peningkatan fungsi kehumasan;
3. Memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana fisik yang telah ada di BPS, antara lain kenyamanan dan kelengkapan fasilitas ruang kerja, serta penyediaan rumah dinas dan sarana transportasi untuk pusat dan daerah;
4. Melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, pengelolaan administrasi keuangan dan administrasi barang di seluruh satuan kerja BPS Pusat maupun Daerah.

STRUKTUR ORGANISASI BADAN PUSAT STATISTIK

Badan Pusat Statistik sesuai Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997 dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2007 mempunyai Perwakilan BPS di Daerah yang merupakan Instansi Vertikal BPS di Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi instansi vertikal BPS, dilaksanakan oleh BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala BPS Nomor 10 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala BPS Nomor 121 Tahun 2001 tentang organisasi dan tata kerja perwakilan BPS di Daerah.

STRUKTUR ORGANISASI BPS KOTA BONTANG TAHUN ANGGARAN 2024



Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan **A.2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan**

Laporan Keuangan Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh BPS Kota Bontang. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

Laporan Keuangan BPS Kota Bontang Tahun Anggaran 2024 disusun melalui Sistem Akuntansi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) yang merupakan sistem yang mengintegrasikan proses perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja negara pada instansi pemerintah, yang merupakan bagian dari sistem pengelolaan

keuangan negara. SAKTI dirancang untuk menghasilkan laporan keuangan untuk berbagai jenjang pelaporan dari tingkat satuan kerja sampai dengan Kementerian Negara/Lembaga yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Laporan keuangan dihasilkan oleh modul-modul yang terdapat pada SAKTI. Laporan keuangan yang menginformasikan tentang pengelolaan keuangan dihasilkan oleh modul penganggaran, komitmen, pembayaran, bendahara, piutang, dan pelaporan (GLP). Laporan keuangan yang menginformasikan pengelolaan Barang Milik Negara dihasilkan oleh modul persediaan dan aset tetap.

Basis
Akuntansi

A.3. Basis Akuntansi

BPS Kota Bontang menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

Dasar
Pengukuran

A.4. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan BPS Kota Bontang dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing ditranslasi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

Kebijakan
Akuntansi

A.5. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan BPS Kota Bontang Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi-konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan ini adalah kebijakan yang ditetapkan oleh Badan Pusat Statistik. Disamping itu, dalam

penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan BPS Kota Bontang Untuk Periode yang Berakhir 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Pendapatan-
LRA **(1) Pendapatan- LRA**

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Pendapatan
LO **(2) Pendapatan- LO**

- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada BPS Kota Bontang adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa;
 - Pendapatan penjualan asset;
 - Pendapatan denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan;
 - Pendapatan penyelesaian ganti rugi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

Belanja **(3) Belanja**

- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Beban (4) **Beban**

- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Aset (5) **Aset**

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

Aset Lancar a. **Aset Lancar**

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal.
- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Rincian Penyisihan Piutang Berdasarkan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0,5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR.
- Persediaan dinilai dengan menggunakan metode FIFO (*first in first out*).
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - biaya perolehan, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri; dan
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

Aset Tetap **b. Aset Tetap**

- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin serta peralatan olahraga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta ribu rupiah);
 - Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
 - Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN.

Penyusutan Aset Tetap **c. Penyusutan Aset Tetap**

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - Tanah;
 - Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP); dan
 - Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.

- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama masa manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Keuangan Nomor 295/KM.06/2019 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan, dan Irigasi	5 s.d. 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Barang Bercorak Kesenian)	4 tahun

Piutang
Jangka
Panjang

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan.

Aset
Lainnya

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud dan Aset Lain-lain.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (Tahun)
<i>Software</i> Komputer	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

Kewajiban **(6) Kewajiban**

- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - Kewajiban Jangka Pendek
Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

Ekuitas **(7) Ekuitas**

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Selama periode berjalan, BPS Kota Bontang telah mengadakan revisi Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dari DIPA awal.

Anggaran belanja Badan Pusat Statistik Kota Bontang Tahun Anggaran 2024 semula Rp5.486.657.000 menjadi Rp5.561.153.000, terdapat kenaikan sebesar Rp74.496.000. Peningkatan anggaran belanja terjadi pada kelompok Belanja Pegawai dan Belanja Modal, sedangkan pada kelompok Belanja Barang terjadi pengurangan anggaran. Anggaran kelompok Belanja Pegawai terdapat kenaikan sebesar Rp53.878.000. Peningkatan ini diperoleh dari anggaran semula sebesar Rp2.954.722.000 berubah menjadi Rp3.008.600.000. Pada kelompok Belanja Modal terjadi peningkatan anggaran sebesar Rp100.000.000 dari semula sebesar Rp0 menjadi Rp100.000.000. Sementara, pada kelompok Belanja Barang mengalami penurunan anggaran sebesar Rp79.382.000, dari anggaran awal sejumlah Rp2.531.935.000 menjadi Rp2.452.553.000.

Estimasi penerimaan pendapatan pada Tahun Anggaran 2024 secara keseluruhan sebesar Rp1.922.000. Nilai estimasi penerimaan pendapatan tersebut teralokasi atas estimasi penerimaan pendapatan kelompok akun Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN yang diperoleh dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan.

Tabel 4
Rincian Anggaran

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)
Pendapatan		
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.922.000	1.922.000
Pendapatan Lain-Lain	0	0
Jumlah Pendapatan	1.922.000	1.922.000
Belanja		
BELANJA PEGAWAI	2.954.722.000	3.008.600.000
BELANJA BARANG	2.531.935.000	2.452.553.000
BELANJA MODAL	0	100.000.000
Jumlah Belanja	5.486.657.000	5.561.153.000

Anggaran belanja Tahun Anggaran 2024 dialokasikan berdasarkan kelompok program kegiatan sebanyak 2 kelompok, yaitu kelompok program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik dan Dukungan Manajemen. Anggaran belanja menurut kelompok program mengalami perubahan selama Tahun Anggaran 2024. Perubahan ini terdapat pada pagu belanja kelompok program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik dan program Dukungan Manajemen. Secara ringkas perubahan pagu belanja menurut kelompok program disajikan dalam tabel berikut.

Tabel 4A
Perubahan Anggaran Belanja Berdasarkan Program

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1.772.278.000	1.663.040.000
Program Dukungan Manajemen	3.714.379.000	3.898.113.000
Jumlah	5.486.657.000	5.561.153.000

Anggaran belanja kelompok program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp109.238.000 dari anggaran semula sebesar Rp1.772.278.000 menjadi sebesar Rp1.663.040.000. Sedangkan anggaran belanja kelompok program Dukungan Manajemen mengalami peningkatan sebesar Rp183.734.000 dari anggaran semula sebesar Rp3.714.379.000 menjadi sebesar Rp3.898.113.000. Atas perubahan anggaran belanja pada program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik dan program Dukungan Manajemen, secara keseluruhan selama Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp74.496.000.

Selain dikelompokkan berdasarkan program, anggaran belanja selama Tahun Anggaran 2024 juga dikelompokkan berdasarkan sumber dana. Kelompok pagu belanja menurut sumber dana yang diterima terbagi menjadi 3 (tiga) jenis sumber dana, yaitu kelompok sumber dana Rupiah Murni (RM), PNBPN, dan Hibah Langsung Luar Negeri. Sumber dana untuk anggaran belanja di Badan Pusat Statistik Kota Bontang berasal dari Rupiah Murni (RM). Pada Tahun Anggaran 2024, anggaran belanja dari kelompok sumber dana Rupiah Murni mengalami kenaikan sebesar Rp74.496.000 dari anggaran semula sebesar Rp5.486.657.000 menjadi Rp5.561.153.000 sebagaimana ditunjukkan oleh tabel berikut.

Tabel 4B
Perubahan Anggaran Belanja Berdasarkan Sumber Dana

Uraian	2024	
	ANGGARAN AWAL (Rp)	ANGGARAN SETELAH REVISI (Rp)
Rupiah Murni (RM)	5.486.657.000	5.561.153.000
PNBP	0	0
Hibah	0	0
Jumlah	5.486.657.000	5.561.153.000

DIPA Awal BPS Kota Bontang dengan Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2024 tanggal 24 November 2023 dengan nomor Digital Stamp (DS): 7172-0087-2946-1659 dengan total nilai pagu anggaran Rp5.486.657.000 (lima miliar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Per 31 Desember 2024, BPS Kota Bontang telah melakukan 11 (sebelas) kali revisi anggaran sebagai berikut:

- a. Revisi ke-1 dilakukan dalam rangka *Automatic Adjustment* TA 2024 sesuai Surat Sestama No. B-7/02000/PR.440/2024. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2024 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2024 tanggal 18 Januari 2024 dengan nomor Digital Stamp (DS): 3831-5604-9679-5550. Total nilai pagu anggaran hasil revisi tetap yaitu Rp5.486.657.000 (lima miliar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- b. Revisi ke-2 dilakukan dalam rangka Pemutakhiran Hal III DIPA. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2024 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2024 tanggal 19 Februari 2024 dengan nomor Digital Stamp (DS): 3831-5604-9679-5550. Total nilai pagu anggaran hasil revisi tetap yaitu Rp5.486.657.000 (lima miliar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- c. Revisi ke-3 dilakukan dalam rangka penyesuaian teknis dan non teknis pada Program Dukman serta PPIS TA 2024 sesuai surat Sestama No. B-151/02000/PR.440/2024. Revisi DIPA dilakukan antara satker di wilayah Kalimantan Timur untuk belanja pegawai dan kegiatan ICP. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2024 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2024 tanggal 5 April 2024 dengan nomor Digital Stamp (DS): 5204-5463-8393-9004. Total nilai pagu anggaran hasil revisi berubah menjadi Rp5.742.980.000 (lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- d. Revisi ke-4 dilakukan dalam rangka Revisi POK dan Pemutakhiran Hal III DIPA. Revisi anggaran ditetapkan

- melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2024 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2024 tanggal 29 Mei 2024 dengan nomor Digital Stamp (DS): 5204-5463-8393-9004. Total nilai pagu anggaran hasil revisi tetap yaitu Rp5.742.980.000 (lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
- e. Revisi ke-5 dilakukan dalam rangka Revisi POK dan Pemutakhiran Hal 3 DIPA. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2024 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2024 tanggal 11 Juli 2024 dengan nomor Digital Stamp (DS): 5204-5463-8393-9004. Total nilai pagu anggaran hasil revisi tetap yaitu Rp5.742.980.000 (lima miliar tujuh ratus empat puluh dua juta sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah).
 - f. Revisi ke-6 dilakukan dalam rangka Revisi DIPA Bulan Juli TA 2024 sesuai Surat Plt. Sekretaris Utama BPS Nomor B-532/02000/PR.450/2024. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2024 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2024 tanggal 15 Agustus 2024 dengan nomor Digital Stamp (DS): 3277-9550-4204-5737. Total nilai pagu anggaran hasil revisi berubah menjadi Rp5.737.924.000 (lima miliar tujuh ratus tiga puluh tujuh juta sembilan ratus dua puluh empat ribu rupiah).
 - g. Revisi ke-7 dilakukan dalam rangka penyesuaian kegiatan Badan Pusat Statistik TA 2024 sesuai Surat Sekretaris Utama BPS Nomor B-699/02000/PR.440/2024. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2024 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2024 tanggal 18 September 2024 dengan nomor Digital Stamp (DS): 6707-5030-0213-2681. Total nilai pagu anggaran hasil revisi berubah menjadi Rp5.707.275.000 (lima miliar tujuh ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - h. Revisi ke-8 dilakukan dalam rangka penyesuaian Hal 3 DIPA. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2024 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2024 tanggal 14 Oktober 2024 dengan nomor Digital Stamp (DS): 6707-5030-0213-2681. Total nilai pagu anggaran hasil revisi tetap yaitu Rp5.707.275.000 (lima miliar tujuh ratus tujuh juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).
 - i. Revisi ke-9 dilakukan dalam rangka penyesuaian kegiatan Badan Pusat Statistik TA 2024 sesuai Surat Sekretaris Utama Nomor B-860/02000/PR.450/2024. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2024 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2024 tanggal 5 November 2024 dengan nomor Digital Stamp (DS): 5841-0964-0837-6041. Total nilai pagu anggaran hasil revisi berubah menjadi Rp5.561.153.000 (lima miliar lima ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).
 - j. Revisi ke-10 dilakukan dalam rangka penyesuaian Anggaran dan Hal 3 DIPA. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat

Pengesahan DIPA Petikan TA 2024 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2024 tanggal 21 November 2024 dengan nomor Digital Stamp (DS): 1197-6738-9100-3876. Total nilai pagu anggaran hasil revisi tetap yaitu Rp5.561.153.000 (lima miliar lima ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).

- k. Revisi ke-11 dilakukan dalam rangka penyesuaian Anggaran dan Hal 3 DIPA. Revisi anggaran ditetapkan melalui Surat Pengesahan DIPA Petikan TA 2024 Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2024 tanggal 5 Desember 2024 dengan nomor Digital Stamp (DS): 1197-6738-9100-3876. Total nilai pagu anggaran hasil revisi tetap yaitu Rp5.561.153.000 (lima miliar lima ratus enam puluh satu juta seratus lima puluh tiga ribu rupiah).

Rincian setiap Revisi DIPA dijelaskan pada Penjelasan Lainnya.

Adapun penambahan anggaran sampai dengan periode 31 Desember 2024 ini berpengaruh terhadap pencapaian realisasi anggaran dan sasaran capaian kinerja yang ditargetkan sampai dengan periode Desember 2024 karena satker perlu meningkatkan efektivitas, kualitas belanja, dan optimalisasi penggunaan anggaran yang terbatas.

Realisasi **PNBP B.1 Pendapatan Negara Bukan Pajak**
Rp1.921.652

Realisasi Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp1.921.652 atau mencapai 99,98 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.922.000. Rincian Pendapatan BPS Kota Bontang sebagai berikut:

Tabel 5
Rincian Estimasi dan Realisasi Pendapatan

Uraian	2024		
	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	% Real Anggaran
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.922.000	1.921.652	99,98
Pendapatan Lain-Lain	0	0	0,00
Jumlah	1.922.000	1.921.652	0

Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN terdiri atas Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.921.652 berupa sewa rumah dinas terhitung 12 (dua belas) bulan per 31 Desember 2024 dan dirinci sebagaimana berikut:

- a. Pendapatan sewa rumah dinas bulan Januari 2024 sebesar Rp160.137 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk Januari 2024 No. 00001A tanggal 1 Januari 2024;
- b. Pendapatan sewa rumah dinas bulan Februari 2024 sebesar Rp160.137 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk Februari 2024 No. 00003A tanggal 9 Januari 2024;
- c. Pendapatan sewa rumah dinas bulan Maret 2024 sebesar Rp160.137 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk Maret 2024 No. 00010A tanggal 7 Februari 2024;
- d. Pendapatan sewa rumah dinas bulan April 2024 sebesar Rp160.137 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk April 2024 No. 00031A tanggal 5 Maret 2024;
- e. Pendapatan sewa rumah dinas bulan Mei 2024 sebesar Rp160.137 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk Mei 2024 No. 00049A tanggal 1 April 2024;
- f. Pendapatan sewa rumah dinas bulan Juni 2024 sebesar Rp160.137 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk Juni 2024 No. 00105A tanggal 8 Mei 2024.
- g. Pendapatan sewa rumah dinas bulan Juli 2024 sebesar Rp123.524 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk Juli 2024 No. 00120A tanggal 4 Juni 2024.
- h. Pendapatan sewa rumah dinas bulan Agustus 2024 sebesar Rp123.524 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk Agustus 2024 No. 00170A tanggal 1 Juli 2024.
- i. Pembayaran kekurangan pendapatan sewa rumah dinas bulan Juli dan Agustus 2024 yang disetor melalui SIMPONI dengan NTB 904788081548 dan NTPN 5DDC32G4VQ3VEHR5 tanggal 16 Oktober 2024 sebesar Rp73.234.
- j. Pendapatan sewa rumah dinas bulan September 2024 sebesar Rp160.137 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk September 2024 No. 00207A tanggal 5 Agustus 2024.
- k. Pendapatan sewa rumah dinas bulan Oktober 2024 sebesar Rp160.137 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk Oktober 2024 No. 00260A tanggal 4 September 2024.
- l. Pendapatan sewa rumah dinas bulan November 2024 sebesar Rp160.137 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk November 2024 No. 00320A tanggal 7 Oktober 2024.
- m. Pendapatan sewa rumah dinas bulan Desember 2024 sebesar Rp160.137 yang disetor melalui potongan pada SPM gaji induk Desember 2024 No. 00365A tanggal 8 November 2024.

Adapun selisih target anggaran Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN dengan realisasi sebesar 0,02 persen berasal dari pembulatan.

Berdasarkan Keputusan KPA BPS Provinsi Kalimantan Timur Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPA BPS Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penunjukan Penghunian Rumah Negara di Lingkungan BPS Provinsi Kalimantan Timur 2024 biaya sewa rumah dinas BPS Kota Bontang yang terletak di Jalan Dewi Sartika Bontang Baru adalah sebesar Rp160.137.

Selama Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat anggaran maupun realisasi Pendapatan Lain-Lain.

Tabel 6
Perbandingan Realisasi Pendapatan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024(Rp)	Realisasi 31 Desember 2023(Rp)	Naik (Turun) %
Pendapatan Dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN	1.921.652	1.921.644	0,00
Pendapatan Lain-Lain	0	29.996	(100,00)
Jumlah	1.921.652	1.951.640	(1,54)

Realisasi Pendapatan 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 1,54 persen dibandingkan realisasi pendapatan pada 31 Desember 2023.

Penurunan realisasi pendapatan pada Tahun Anggaran 2024 dibanding Tahun Anggaran 2023 disumbangkan oleh menurunnya Pendapatan Lain-Lain pada Tahun Anggaran 2024. Pada Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat Pendapatan Lain-Lain. Sedangkan, pada Tahun Anggaran 2023 Pendapatan Lain-Lain diperoleh dari koreksi transaksi pengembalian UP 2023 senilai Rp29.996 dari SPM GUP Nihil Nomor 00370A tanggal 14 Desember 2023. Koreksi transaksi dikonfirmasi melalui Surat KPPN Nomor S-23/KPN.2001/2024 dengan Nota Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara Nomor 046/12/2023 tanggal 4 Januari 2024.

Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN senilai Rp1.921.652 berasal

dari Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berupa sewa rumah dinas bulan Januari-Desember 2024 sebesar Rp1.921.652.

Terdapat kenaikan realisasi Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN per 31 Desember 2024 dibanding per 31 Desember 2023. Kenaikan sebesar Rp8 per 31 Desember 2024 disebabkan adanya lebih bayar sebesar Rp8 pada pembayaran kekurangan sewa rumah dinas bulan Juli dan Agustus 2024 yang disetor melalui SIMPONI dengan NTB 904788081548 dan NTPN 5DDC32G4VQ3VEHR5 tanggal 16 Oktober 2024 sebesar Rp73.234.

*Realisasi Belanja
Negara
Rp4.892.697.247*

B.2 Belanja

Realisasi Belanja instansi per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp4.892.697.247 atau 87,98 persen dari anggaran belanja sebesar Rp5.561.153.000. Rincian anggaran dan realisasi belanja 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 7
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja 31 Desember 2024*

Uraian	2024		
	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	% Real Anggaran
BELANJA PEGAWAI	3.008.600.000	2.991.647.263	99,44
BELANJA BARANG	2.452.553.000	1.805.049.984	73,60
BELANJA MODAL	100.000.000	96.000.000	96,00
Jumlah Netto	5.561.153.000	4.892.697.247	87,98

Anggaran dan realisasi belanja Badan Pusat Statistik Kota Bontang selama Tahun Anggaran 2024 menurut kelompok jenis belanja, masing-masing sebesar Rp5.561.153.000 dan Rp4.892.697.247. Komposisi anggaran dan realisasi belanja yang terbagi menjadi tiga jenis belanja yaitu Belanja Pegawai, Belanja Barang, dan Belanja Modal dari keseluruhan nilai anggaran dan realisasi adalah sebagai berikut:

1. Komposisi anggaran Belanja Pegawai dari keseluruhan nilai anggaran per jenis belanja adalah 54,10 persen atau senilai Rp3.008.600.000. Komposisi realisasi Belanja Pegawai netto dari keseluruhan realisasi belanja adalah 61,15 persen atau senilai Rp2.991.647.263. Sedangkan persentase realisasi Belanja Pegawai jika dibandingkan dengan anggaran Belanja Pegawai adalah 99,44 persen.

2. Komposisi anggaran Belanja Barang dari keseluruhan nilai anggaran per jenis belanja adalah 44,10 persen atau senilai Rp2.452.553.000. Komposisi realisasi Belanja Barang netto dari keseluruhan realisasi belanja adalah 36,89 persen atau senilai Rp1.805.049.984. Sedangkan persentase realisasi Belanja Barang jika dibandingkan dengan anggaran Belanja Barang adalah 73,60 persen.
3. Komposisi anggaran Belanja Modal dari keseluruhan nilai anggaran per jenis belanja adalah 1,80 persen atau senilai Rp100.000.000. Komposisi realisasi Belanja Modal netto dari keseluruhan realisasi belanja adalah 1,96 persen atau senilai Rp96.000.000. Sedangkan persentase realisasi Belanja Modal jika dibandingkan dengan anggaran Belanja Modal adalah 96,00 persen.

Persentase anggaran Belanja Pegawai merupakan yang terbesar dari keseluruhan nilai anggaran menurut jenis belanja dibandingkan dengan anggaran Belanja Barang dan Belanja Modal selama Tahun Anggaran 2024.

Tabel 7A
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Program
per 31 Desember 2024

Uraian	2024		
	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	% Real Anggaran
Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik	1.663.040.000	1.024.312.267	61,59
Program Dukungan Manajemen	3.898.113.000	3.868.384.980	99,24
Jumlah Netto	5.561.153.000	4.892.697.247	87,98

Anggaran dan realisasi belanja Badan Pusat Statistik Kota Bontang selama Tahun Anggaran 2024 menurut program, masing-masing sebesar Rp5.561.153.000 dan Rp4.892.697.247. Komposisi anggaran dan realisasi belanja yang terbagi menjadi dua jenis program yaitu Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik dan Program Dukungan Manajemen dari keseluruhan nilai anggaran dan realisasi adalah sebagai berikut:

1. Komposisi anggaran Belanja Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik dari keseluruhan nilai anggaran per jenis program adalah 29,90 persen atau senilai Rp1.663.040.000. Komposisi realisasi Belanja Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik netto dari keseluruhan realisasi belanja adalah 20,94 persen atau senilai Rp1.024.312.267. Sedangkan persentase realisasi Belanja

Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik jika dibandingkan dengan anggarannya adalah sebesar 61,59 persen. Pagu ini digunakan untuk menunjang tugas pokok dan fungsi BPS yaitu menyediakan dan memberikan pelayanan informasi statistik yang berkualitas dalam rangka memenuhi kebutuhan pengguna data.

2. Komposisi anggaran Belanja Program Dukungan Manajemen dari keseluruhan nilai anggaran per jenis program adalah 70,10 persen atau senilai Rp3.898.113.000. Komposisi realisasi Belanja Program Dukungan Manajemen netto dari keseluruhan realisasi belanja adalah 79,06 persen atau senilai Rp3.868.384.980. Sedangkan persentase realisasi Belanja Program Dukungan Manajemen jika dibandingkan dengan anggarannya adalah sebesar 99,24 persen. Pagu ini digunakan untuk menampung kebutuhan biaya gaji dan tunjangan pegawai termasuk tunjangan kinerja pegawai, operasional perkantoran, dan kegiatan non operasional lainnya.

*Tabel 7B
Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Menurut Sumber Dana
per 31 Desember 2024*

Uraian	2024		
	Anggaran (Rp)	Realisasi(Rp)	% Real Anggaran
Rupiah Murni (RM)	5.561.153.000	4.892.697.247	87,98
PNBP	0	0	-
Hibah	0	0	-
Jumlah Netto	5.561.153.000	4.892.697.247	87,98

Apabila dilihat menurut sumber dana, realisasi belanja dengan sumber dana Rupiah Murni adalah sebesar 87,98 persen. Selama Tahun Anggaran 2024 di BPS Kota Bontang tidak terdapat anggaran dan realisasi belanja menggunakan sumber dana PNBP maupun Hibah. Anggaran dalam kelompok sumber dana Rupiah Murni merupakan anggaran yang digunakan untuk membiayai berbagai kegiatan, antara lain:

1. Pengembangan dan Analisis Statistik (2896) sebesar Rp600.000 dengan realisasi belanja netto sebesar Rp0 atau 0,00 persen;
2. Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik (2897) sebesar Rp43.470.000 dengan realisasi belanja netto sebesar Rp38.793.294 atau 89,24 persen;
3. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran (2898) sebesar Rp37.687.000 dengan realisasi belanja netto sebesar Rp36.184.790 atau 96,01 persen;

4. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi (2899) sebesar Rp33.674.000 dengan realisasi belanja netto sebesar Rp20.695.122 atau 61,46 persen;
5. Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei (2900) sebesar Rp283.000 dengan realisasi belanja netto sebesar Rp0 atau 0,00 persen;
6. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi (2902) sebesar Rp40.590.000 dengan realisasi belanja netto sebesar Rp20.759.713 atau 51,14 persen;
7. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga (2903) sebesar Rp71.194.000 dengan realisasi belanja netto sebesar Rp44.380.684 atau 62,34 persen;
8. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi (2904) sebesar Rp87.670.000 dengan realisasi belanja netto sebesar Rp62.374.486 atau 71,15 persen;
9. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan (2905) sebesar Rp165.026.000 dengan realisasi belanja netto sebesar Rp162.154.303 atau 98,26 persen;
10. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat (2906) sebesar Rp285.882.000 dengan realisasi belanja netto sebesar Rp282.626.160 atau 98,86 persen;
11. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial (2907) sebesar Rp19.618.000 dengan realisasi belanja netto sebesar Rp14.471.120 atau 73,76 persen;
12. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata (2908) sebesar Rp67.074.000 dengan realisasi belanja netto sebesar Rp57.592.037 atau 85,86 persen;
13. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan (2909) sebesar Rp16.992.000 dengan realisasi belanja netto sebesar Rp5.200.000 atau 30,60 persen;
14. Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan (2910) sebesar Rp793.280.000 dengan realisasi belanja netto sebesar Rp279.080.558 atau 35,18 persen;
15. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi (2886) sebesar Rp3.898.113.000 dengan realisasi belanja netto sebesar Rp3.868.384.980 atau 99,24 persen.

Tabel 8
Perbandingan Realisasi Belanja 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Naik (Turun) %
BELANJA PEGAWAI	3.001.046.069	2.720.928.026	10,29

BELANJA BARANG	1.805.185.984	2.807.525.315	(35,70)
BELANJA MODAL	96.000.000	652.980.000	(85,30)
Jumlah Bruto	4.902.232.053	6.181.433.341	(20,69)
Pengembalian Belanja	9.534.806	365.072	2.511,76
Jumlah	4.892.697.247	6.181.068.269	(20,84)

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 20,84 persen dibandingkan realisasi belanja pada 31 Desember 2023.

Realisasi Belanja Pegawai selama periode Tahun Anggaran 2024 mengalami peningkatan sebesar Rp280.118.043 atau sebesar 10,29 persen dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2023. Peningkatan realisasi Belanja Pegawai pada Tahun Anggaran 2024 terjadi pada realisasi Belanja Gaji dan Tunjangan PNS, Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK, dan Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito. Peningkatan ini disebabkan adanya penambahan pegawai baru CPNS dan PPPK di BPS Kota Bontang.

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp1.002.339.331 atau sebesar 35,70 persen dibandingkan dengan per 31 Desember 2023. Penurunan realisasi Belanja Barang pada Tahun Anggaran 2024 terjadi pada realisasi Belanja Barang Operasional, Belanja Barang Non Operasional, Belanja Barang Persediaan, Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Perjalanan Dalam Negeri. Terjadinya penurunan ini berkaitan dengan berkurangnya anggaran Belanja Barang yang disebabkan oleh berkurangnya jumlah kegiatan besar yang dilaksanakan di Tahun Anggaran 2024, adanya transisi metode pelatihan petugas secara hibrid melalui pembelajaran mandiri, serta perubahan moda pendataan pada beberapa survei dari PAPI ke CAPI. Selain itu, penurunan realisasi belanja perjalanan dalam negeri disebabkan oleh penghematan anggaran belanja perjalanan dinas sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 yang ditindaklanjuti melalui Surat Sestama Nomor B-928/02000/PR.400/2024 tanggal 8 November 2024 tentang Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Badan Pusat Statistik TA 2024.

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar Rp556.980.000 atau sebesar 85,30 persen dibandingkan dengan per 31 Desember 2023. Penurunan realisasi Belanja Modal pada Tahun Anggaran 2024 terjadi pada realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Pada Tahun Anggaran 2024 dilakukan pembelian peralatan dan mesin berupa Laptop sebanyak 4 (empat) unit. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 dilakukan pembelian peralatan dan mesin berupa *Station Wagon* sebanyak 1 (satu) unit, PC sebanyak

10 (sepuluh) unit, UPS sebanyak 10 (sepuluh) unit, dan Scanner sebanyak 1 (satu) unit.

Per 31 Desember 2024 terdapat pengembalian belanja sebesar Rp9.534.806. Pengembalian belanja ini diperoleh dari pengembalian Belanja Pegawai sebesar Rp9.398.806 yang terdiri atas akun Belanja Gaji Pokok PNS, Belanja Pembulatan Gaji PNS, Belanja Tunj. Suami/Istri PNS, Belanja Tunj. Anak PNS, Belanja Tunj. Beras PNS, Belanja Tunjangan Umum PNS, dan Belanja Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja. Pengembalian Belanja Pegawai disebabkan adanya pengembalian Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja sebagai bentuk hukuman disiplin pegawai, pengembalian gaji induk pegawai yang melakukan mutasi keluar dari BPS Kota Bontang, dan pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS bagi CPNS yang sudah dilantik menjadi PNS dengan jabatan fungsional. Selain itu, terdapat pengembalian Belanja Barang sebesar Rp136.000 atas akun Belanja Honor Output Kegiatan. Pengembalian Belanja Honor Output Kegiatan disebabkan adanya lebih bayar honor petugas pendataan lapangan Survei Khusus Neraca Produksi bulan Juli 2024.

*Belanja Pegawai
Rp2.991.647.263*

B.3 Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.991.647.263 dan Rp2.720.562.954. Belanja Pegawai adalah belanja atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

*Tabel 9
Perbandingan Belanja Pegawai Sampai dengan 31 Desember 2024
dan 31 Desember 2023*

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	1.537.499.800	1.316.909.733	16,75
Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK	45.900.545	0	0,00
Belanja Lembur	16.706.000	110.189.000	(84,84)
Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito	1.400.939.724	1.293.829.293	8,28
Jumlah Bruto	3.001.046.069	2.720.928.026	10,29
Pengembalian Belanja	9.398.806	365.072	2.474,51
Jumlah	2.991.647.263	2.720.562.954	9,96

Realisasi belanja sampai dengan 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 9,96 persen dari 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan antara lain oleh:

1. Belanja Gaji dan Tunjangan PNS per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 16,75 persen dibandingkan 31 Desember 2023 disebabkan adanya penambahan pegawai baru CPNS di BPS Kota Bontang, adanya pegawai yang mendapatkan Kenaikan Gaji Berkala (KGB), dan terdapat penambahan jumlah pegawai yang memiliki jabatan fungsional
2. Belanja Gaji dan Tunjangan PPPK per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dibandingkan 31 Desember 2023 disebabkan adanya penambahan pegawai baru PPPK di BPS Kota Bontang.
3. Belanja Lembur per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 84,84 persen dibandingkan per 31 Desember 2023 disebabkan menurunnya kebutuhan penyelesaian pekerjaan di luar jam kerja.
4. Belanja Tunj. Khusus & Belanja Pegawai Transito per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 8,28 persen dibandingkan 31 Desember 2023 disebabkan adanya penambahan pegawai baru CPNS di BPS Kota Bontang.
5. Realisasi pengembalian belanja pegawai per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 2.474,51 persen dibandingkan 31 Desember 2023. Pengembalian belanja pegawai sebesar Rp9.398.806 dirinci sebagai berikut:
 - a. Pengembalian Gaji Induk Pegawai bulan Mei 2024 atas nama Totok Arianto akibat mutasi keluar dengan rincian Belanja Gaji Pokok PNS sebesar Rp3.069.038, Belanja Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp1.264, Belanja Tunj. Suami/Istri PNS sebesar Rp346.110, Belanja Tunj. Anak PNS sebesar Rp138.444, Belanja Tunj. Beras PNS sebesar Rp289.680, Belanja Tunjangan Umum PNS sebesar Rp2.035.000.
 - b. Pengembalian kelebihan bayar Belanja Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja bulan Maret-April 2024 atas nama Rizky Eka Maharsa berdasarkan SK Hukuman Disiplin No. 001/6474/KPG Tahun 2024 sebesar Rp3.154.194.
 - c. Pengembalian Belanja Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp26 atas nama Octarina Nuria Salsabila akibat

pembayaran belanja pegawai untuk kekurangan gaji bulan Juni 2024.

- d. Pengembalian Belanja Tunjangan Umum PNS sebesar Rp365.050 atas nama Puput Handayani dan Ananda Trinita Nurazizah akibat pembayaran belanja pegawai untuk kekurangan gaji tunjangan fungsional bulan November 2024.

Belanja Barang
Rp1.805.049.984

B.4 Belanja Barang

Realisasi Belanja Barang per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.805.049.984 dan Rp2.807.525.315.

Tabel 10
Perbandingan Belanja Barang Sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Barang Operasional	115.294.293	334.016.587	(65,48)
Belanja Barang Non Operasional	639.263.235	1.328.180.750	(51,87)
Belanja Barang Persediaan	90.589.930	126.372.070	(28,31)
Belanja Jasa	423.646.741	119.737.297	253,81
Belanja Pemeliharaan	64.271.053	117.718.978	(45,40)
Belanja Perjalanan Dalam Negeri	472.120.732	781.499.633	(39,59)
Jumlah Bruto	1.805.185.984	2.807.525.315	(35,70)
Pengembalian Belanja	136.000	0	0,00
Jumlah	1.805.049.984	2.807.525.315	(35,71)

Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar (35,71) persen dari Realisasi Belanja Barang 31 Desember 2023.

Beberapa penjelasan terkait Belanja Barang diuraikan sebagai berikut:

1. Secara umum, penurunan Belanja Barang disebabkan karena menurunnya anggaran Belanja Barang Tahun Anggaran 2024 dibandingkan Tahun Anggaran 2023. Penurunan anggaran ini berdampak pada menurunnya Belanja Barang Operasional, Belanja Barang Non Operasional, Belanja Barang Persediaan,

Belanja Pemeliharaan, dan Belanja Perjalanan Dalam Negeri. Terjadinya penurunan ini berkaitan dengan berkurangnya anggaran Belanja Barang yang disebabkan oleh berkurangnya jumlah kegiatan besar yang dilaksanakan di Tahun Anggaran 2024, adanya transisi metode pelatihan petugas secara hibrid melalui pembelajaran mandiri, serta perubahan moda pendataan pada beberapa survei dari PAPI ke CAPI.

2. Realisasi Belanja Pemeliharaan mengalami penurunan sebesar 45,40 persen dibandingkan per 31 Desember 2023 karena tidak terdapat perbaikan besar yang dilakukan terhadap aset, peralatan, mesin, dan bangunan di BPS Kota Bontang hingga periode 31 Desember 2024.
3. Penurunan realisasi belanja perjalanan dalam negeri sebesar 39,59 persen disebabkan oleh penghematan anggaran belanja perjalanan dinas sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 yang ditindaklanjuti melalui Surat Sestama Nomor B-928/02000/PR.400/2024 tanggal 8 November 2024 tentang Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Badan Pusat Statistik TA 2024.
4. Realisasi Belanja Jasa mengalami peningkatan sebesar 253,81 persen disebabkan peningkatan Belanja Langganan Listrik, Langganan Daya dan Jasa Lainnya, serta Belanja Jasa Lainnya. Meningkatnya Belanja Langganan Listrik terjadi karena adanya peningkatan konsumsi listrik untuk mendukung terselenggarakannya kegiatan di BPS Kota Bontang. Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya mengalami peningkatan karena adanya perubahan akun yang dipakai dalam mencatat pembayaran tagihan internet bulanan. Perubahan ini dilakukan dari menggunakan akun Belanja Keperluan Perkantoran pada tahun anggaran sebelumnya menjadi Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya. Selain itu, pada Tahun Anggaran 2024, BPS Kota Bontang melakukan penambahan daya internet yang turut meningkatkan nilai Belanja Langganan Daya dan Jasa Lainnya. Sementara, peningkatan Belanja Jasa Lainnya disebabkan karena meningkatnya belanja Biaya Jasa Manajemen Building pada Tahun Anggaran 2024.
5. Realisasi pengembalian belanja barang per 31 Desember 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,00 persen dibandingkan 31 Desember 2023. Pengembalian belanja barang sebesar Rp136.000 dirinci sebagai berikut:
 - Pengembalian kelebihan bayar Belanja Honor Output Kegiatan sebesar Rp136.000 dari honor petugas

pendataan lapangan Survei Khusus Neraca Produksi bulan Juli 2024 atas nama Mansur.

Belanja Modal
Rp96.000.000

B.5 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp96.000.000 dan Rp652.980.000. Belanja modal merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi.

Tabel 11
Perbandingan Realisasi Belanja Modal sampai dengan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.000.000	652.980.000	(85,30)
Jumlah Bruto	96.000.000	652.980.000	(85,30)
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah	96.000.000	652.980.000	(85,30)

Realisasi Belanja Modal mengalami penurunan pada 31 Desember 2024 sebesar 85,30 persen dibandingkan 31 Desember 2023 disebabkan oleh penurunan Belanja Modal Peralatan dan Mesin. Beberapa rincian Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang dilakukan oleh BPS Kota Bontang selama Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut.

- Pembelian barang modal peralatan dan mesin berupa Laptop merek Asus N B1402CBA ID-NK7850X/16-1 sebanyak 4 unit dengan BAST No. 455/PPK/BPS-BONTANG/12/2024 pada tanggal 10 Desember 2024 senilai Rp96.000.000.

B.5.1 Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp96.000.000 dan Rp652.980.000.

Tabel 12
Perbandingan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin 31
Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian Jenis Belanja	Realisasi 31 Desember 2024 (Rp)	Realisasi 31 Desember 2023 (Rp)	Naik (Turun) %
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	96.000.000	652.980.000	(85,30)
Jumlah Bruto	96.000.000	652.980.000	(85,30)
Pengembalian Belanja	0	0	0,00
Jumlah	text-align: right;">96.000.000	text-align: right;">652.980.000	text-align: right;">(85,30)

Realisasi tersebut pada 31 Desember 2024, mengalami penurunan sebesar 85,30 persen bila dibandingkan dengan realisasi 31 Desember 2023 sebesar Rp652.980.000.

Adapun Belanja Modal yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2024 dapat dirinci sebagai berikut.

- Pembelian barang modal peralatan dan mesin berupa Laptop merek Asus N B1402CBA ID-NK7850X/16-1 sebanyak 4 unit dengan BAST No. 455/PPK/BPS-BONTANG/12/2024 pada tanggal 10 Desember 2024 senilai Rp96.000.000.

Sedangkan, Belanja Modal yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2023 meliputi pembelian sebagai berikut.

1. Pembelian barang modal peralatan dan mesin berupa Station Wagon merek Kijang Innova 2.0 G MT tipe TGN140R-MDMSKD sebanyak 1 unit dengan BAST No. 180/PPK/BPS-BONTANG/03/2023 pada tanggal 24 Maret 2023 senilai Rp 334.700.000.
2. Pembelian barang modal peralatan dan mesin berupa PC Acer Vetron X iCore 7 sebanyak 10 unit dengan BAST No. 703/PPK/BPS-BONTANG/11/2023 pada tanggal 28 November 2023 senilai Rp 279.700.000.
3. Pembelian barang modal peralatan dan mesin berupa UPS ICA CN 650 sebanyak 10 unit dengan BAST No. 703/PPK/BPS-BONTANG/11/2023 pada tanggal 28 November 2023 senilai Rp 17.600.000.
4. Pembelian barang modal peralatan dan mesin berupa Scanner Fujitsu FI-8150 U ADF sebanyak 1 unit dengan BAST No. 703/PPK/BPS-BONTANG/11/2023 pada tanggal 28 November 2023 senilai Rp 20.980.000.

C.PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

Belanja Dibayar di Muka Rp12.379.563

C.1 Belanja Dibayar di Muka

Saldo Belanja Dibayar di Muka per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp12.379.563 dan Rp3.522.137. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima setelah tanggal neraca sebagai akibat dari barang/jasa telah dibayarkan secara penuh namun barang atau jasa belum diterima seluruhnya. Rincian Belanja Dibayar di Muka adalah sebagai berikut:

*Tabel 13
Rincian Belanja Dibayar di Muka 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

Jenis	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023(Rp)
Belanja Barang yang Dibayar Dimuka (prepaid)	12.379.563	3.522.137
Jumlah	12.379.563	3.522.137

Belanja barang yang dibayar di muka per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp12.379.563. Nilai ini terdiri dari komponen sebagai berikut.

- Belanja langganan listrik berupa sisa token listrik per 31 Desember 2024 sebanyak 6855,60 kWh senilai Rp11.667.577.
- Belanja keperluan perkantoran berupa sisa langganan *Domain Web* per 31 Desember 2024 selama 174 hari hingga 23 Juni 2025 senilai Rp70.224.
- Belanja keperluan perkantoran berupa sisa langganan *Zoom Premium* per 31 Desember 2024 selama 145 hari hingga 25 Mei 2025 senilai Rp641.762.

Persediaan Rp51.621.251

C.2 Persediaan

Nilai Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp51.621.251 dan Rp65.313.890. Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan/atau untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Rincian Persediaan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 14
Rincian Persediaan Sampai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Jenis	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Barang Konsumsi	48.105.029	64.411.090
Bahan untuk Pemeliharaan	3.516.222	902.800
Jumlah	51.621.251	65.313.890

Per 31 Desember 2024 nilai persediaan sebesar Rp51.621.251 terdiri atas barang konsumsi senilai Rp48.105.029 dan bahan untuk pemeliharaan senilai Rp3.516.222. Seluruh barang persediaan dalam kondisi baik dan digunakan untuk menunjang kegiatan di di BPS Kota Bontang.

Mutasi Nilai Persediaan 31 Desember 2024 dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2023	65.313.890
Mutasi Tambah :	
Pembelian	90.589.930
Transfer Masuk	65.938.189
Reklasifikasi Masuk	2.140.000
Koreksi Kuantitas Tambah	1.280.000
Total Mutasi Tambah :	159.948.119
Mutasi Kurang :	
Habis Pakai	(171.500.758)
Reklasifikasi Keluar	(2.140.000)
Total Mutasi Kurang :	(173.640.758)
Kenaikan(Penurunan)	(13.692.639)
Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2024	51.621.251

Per 31 Desember 2024 terdapat mutasi tambah persediaan sebesar Rp159.948.119. Mutasi penambahan persediaan terdiri dari Pembelian, Transfer Masuk, Reklasifikasi Masuk, dan Koreksi Kuantitas. Beberapa penjelasan terkait mutasi tambah persediaan adalah sebagai berikut.

- a. Pembelian Persediaan per 31 Desember 2024 sebesar Rp90.589.930 terdiri atas pembelian Barang Konsumsi senilai Rp81.145.589 dan Bahan untuk Pemeliharaan senilai Rp9.444.341.
- b. Reklasifikasi Masuk sebesar Rp2.140.000 terdiri atas reklasifikasi masuk Ordner dan Map untuk 100 Box Arsip Cokelat. Reklasifikasi dilakukan karena adanya kesalahan pemilihan kodifikasi untuk barang konsumsi 100 Box Arsip Cokelat dengan kode awal barang berupa Buku Tulis menjadi Ordner dan Map.
- c. Koreksi Kuantitas Tambah sebesar Rp1.280.000 terdiri atas koreksi atas kesalahan perekaman kuantitas barang konsumsi Ordner dan Map berupa Map Biola sebanyak 400 buah senilai Rp1.280.000.
- d. Transfer Masuk sebesar Rp65.938.189 merupakan transfer barang persediaan berupa barang konsumsi dari BPS Provinsi Kalimantan Timur berupa:
 1. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-163/64510/PL.714/2024 Tanggal 16 Januari 2024 yang terdiri dari 640 tiras Kuesioner Susenas Maret 2024 Kor (VSEN24.K), dan 640 tiras Kuesioner Susenas Maret 2024 Konsumsi dan Pengeluaran (VSEN24.KP) senilai Rp16.844.800.
 2. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-237/64510/PL.714/2024 Tanggal 1 Februari 2024 yang terdiri dari 34 buah Kalender Dinding 2024, 4 buah Kalender Meja 2024, dan 23 buah Buku Kerja 2024 senilai Rp1.608.544.
 3. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-349/64510/PL.714/2024 Tanggal 19 Februari 2024 yang terdiri dari 163 tiras Kuesioner SERUTI Triwulan 1 2024 senilai Rp321.925.
 4. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-359/64510/PL.714/2024 Tanggal 29 Februari 2024 yang terdiri dari 39 lembar Surat Pengantar Survei Konstruksi TA 2024, 45 buah Amplop Coklat Survei Konstruksi TA 2024, 39 set Kuesioner Survei Konstruksi Triwulan SKTR 2024, dan 47 set Kuesioner Survei Konstruksi Tahunan SKTH 2023 senilai Rp196.430.
 5. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-388/64510/PL.714/2024 Tanggal 18 April 2024 yang terdiri dari 8 rangkap Kuesioner Survei Tahunan

Perusahaan Industri Manufaktur 2023, dan 21 rangkap Kuesioner Survei Captive Power 2024 senilai Rp95.700.

6. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-414/64510/PL.714/2024 Tanggal 17 Mei 2024 yang terdiri dari 823 set Kuesioner ST2023.SEP.UTP senilai Rp4.938.000
7. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-424/64510/PL.714/2024 Tanggal 21 Mei 2024 yang terdiri dari 105 set Kuesioner Survei IMK 2024 Tahunan senilai Rp210.000.
8. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-531/64510/PL.714/2024 Tanggal 5 Juli 2024 yang terdiri dari 26 tiras Buku Pedoman Pencacahan Sakernas Agustus 2024 senilai Rp3.107.000.
9. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-894/64510/PL.714/2024 Tanggal 30 Agustus 2024 yang terdiri dari 157 buku Kuesioner Susenas VSEN24.MSBP, 157 buku Kuesioner Susenas VSEN24.KP, 157 buku Kuesioner Seruti Inti VSERUTI24.INTI, 2 buku Buku 1 Pedoman Pimpinan BPS Susenas MSBP 2024, 22 buku Buku 2 Pedoman Pendata Susenas MSBP 2024, 9 buku Buku 3 Pedoman Pengawas Susenas MSBP 2024, 22 buku Buku 4 Konsep dan Definisi Susenas MSBP 2024, 22 buku Buku 5 Pemanfaatan Data Susenas MSBP 2024 senilai Rp6.205.200.
10. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-987/64510/PL.714/2024 Tanggal 21 Oktober 2024 yang terdiri dari 148 eksemplar Kuesioner Seruti Inti Triwulan 4 VSERUTI24.INTI, 148 eksemplar Kuesioner Seruti Makanan Triwulan 4 VSERUTI24.MAK senilai Rp2.812.000.
11. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-1052/64510/PL.714/2024 Tanggal 25 November 2024 yang terdiri dari 46 set Kuesioner Sub-S Survei Ubinan 2025, 5 buku Daftar SP-Palawija (2) 2025, 5 buku Daftar SP-Lahan, SP-Alsintan TP dan Benih TP (1) 2025, 1 buku Rekap Kab/kota SP Tanaman Pangan 2025, dan 9 paket Sepatu Boot dan Terpal Biru Ubinan senilai Rp2.516.590.
12. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-1107/64510/PL.714/2024 Tanggal 30 Desember 2024 yang terdiri dari 675 set Kuesioner Susenas VSEN25.K, 675 set Kuesioner VSEN25.KP, 57 buku Buku 2 Pedoman Petugas Pencacah Susenas Maret 2025, 21 buku

Buku 3 Pedoman Pengawas Susenas Maret 2025, 57 buku
Buku 4 Konsep dan Definisi Susenas Maret 2025, 157 set
Kuesioner Seruti Inti VSERUTI25.INTI, 21 buku Buku
Pedoman Seruti 2025 senilai Rp21.999.500.

13. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-1127/64510/PL.714/2024 Tanggal 30 Desember 2024 yang terdiri dari 744 eksemplar Kuesioner HP 2025, 36 eksemplar Kuesioner HP-JA 2025, 60 eksemplar Kuesioner HP-JP 2025, 60 eksemplar Kuesioner HP-JR 2025, 60 eksemplar Kuesioner HP-JS 2025, 110 eksemplar Suplemen Survei Harga Produsen 2025 senilai Rp2.640.500.
14. Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor Lainnya dengan No BAST B-1149/64510/PL.714/2024 Tanggal 31 Desember 2024 yang terdiri dari 33 eksemplar Kalender Dinding 2025, 22 eksemplar Kalender Meja 2025, dan 22 eksemplar Buku Kerja 2025 senilai Rp2.442.000.

Per 31 Desember 2024 terdapat mutasi kurang persediaan sebesar Rp173.640.758. Mutasi pengurangan persediaan terdiri atas pemakaian (habis pakai) dan Reklasifikasi Keluar. Beberapa penjelasan terkait mutasi kurang persediaan adalah sebagai berikut.

- a. Pengurangan persediaan yang berasal dari pemakaian persediaan hingga 31 Desember 2024 sebesar Rp171.500.758. Pemakaian ini terdiri atas pemakaian Barang Konsumsi senilai Rp164.669.839 dan Bahan untuk Pemeliharaan senilai Rp6.830.919.
- b. Reklasifikasi Keluar sebesar Rp2.140.000 terdiri atas reklasifikasi keluar Buku Tulis untuk 100 Box Arsip Cokelat. Reklasifikasi dilakukan karena adanya kesalahan pemilihan kodifikasi untuk barang konsumsi 100 Box Arsip Cokelat dengan kode awal barang berupa Buku Tulis menjadi Ordner dan Map.

Tanah
Rp1.504.778.000

C.3 Tanah

Nilai aset tetap berupa tanah yang dimiliki 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.504.778.000 dan Rp1.504.778.000. Mutasi nilai tanah tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2023	1.504.778.000
Mutasi Tambah :	

Total Mutasi Tambah :	<u>0</u>
Mutasi Kurang :	
Total Mutasi Kurang :	<u>0</u>
Kenaikan(Penurunan)	<u>0</u>
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	1.504.778.000

Tanah bangunan rumah negara Gol. I seluas 271 m2 senilai Rp 129.000.000 yang terletak di Jalan Dewi Sartika, Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang, Kalimantan Timur. Pada tanggal pelaporan dikuasai/ digunakan untuk rumah dinas Kepala BPS Kota Bontang dengan sertifikat Nomor 16.08.01.02.4.00038 atas nama Pemerintah RI c.q Badan Pusat Statistik.

Tanah Kantor seluas 796 m2 senilai Rp 292.237.000 yang terletak di Jalan Awang Long, Bontang Baru, Bontang Utara, Kota Bontang, bersumber dari pembelian dengan sertifikat Nomor 16.08.01.02.4.00039 atas nama Pemerintah RI c.q Badan Pusat Statistik.

Tanah bangunan rumah dan tanah kantor tersebut di atas dalam kondisi baik dan digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi BPS Kota Bontang.

Peralatan dan Mesin **C.4 Peralatan dan Mesin**
Rp2.235.895.972

Saldo aset tetap berupa Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp2.235.895.972 dan Rp2.337.354.471. Mutasi nilai Peralatan dan Mesin tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2023	2.337.354.471
Mutasi Tambah :	
Pembelian	96.000.000
Total Mutasi Tambah :	96.000.000
Mutasi Kurang :	
Penghentian Aset Dari Penggunaan	(197.458.499)
Total Mutasi Kurang :	(197.458.499)
Kenaikan(Penurunan)	<u>(101.458.499)</u>

Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	2.235.895.972
Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2024	(1.652.029.974)
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2024	583.865.998

Per 31 Desember 2024 terdapat mutasi tambah Peralatan dan Mesin sebesar Rp96.000.000. Mutasi tambah Peralatan dan Mesin terdiri atas Pembelian. Beberapa penjelasan terkait mutasi tambah Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut.

- Pembelian Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2024 sebesar Rp96.000.000 terdiri atas Pembelian barang modal peralatan dan mesin berupa Laptop merek Asus N B1402CBA ID-NK7850X/16-1 sebanyak 4 unit dengan BAST No. 455/PPK/BPS-BONTANG/12/2024 pada tanggal 10 Desember 2024 senilai Rp96.000.000.

Per 31 Desember 2024 terdapat mutasi pengurangan Peralatan dan Mesin sebesar Rp197.458.499. Mutasi kurang Peralatan dan Mesin terdiri atas Penghentian Aset Dari Penggunaan. Beberapa penjelasan terkait mutasi kurang Peralatan dan Mesin adalah sebagai berikut.

- a. Penghentian Aset dari Penggunaan Peralatan dan Mesin berupa *Note Book* dengan kondisi rusak berat sebanyak 2 unit sesuai Surat Keterangan Perubahan Kondisi BMN Nomor B-327/64741/PL.520/12/2024 tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp33.094.500. Rincian aset peralatan dan mesin berupa *Note Book* yang dihentikan penggunaannya dirinci sebagai berikut.
 - *Note Book* merek Lenovo/T4204177 tanggal perolehan 2 November 2011 senilai Rp17.584.500 dengan NUP 2 dalam kondisi rusak berat.
 - *Note Book* merek Fujitsu/SH782 tanggal perolehan 30 Juni 2013 senilai Rp15.510.000 dengan NUP 3 dalam kondisi rusak berat.
- b. Penghentian Aset dari Penggunaan Peralatan dan Mesin berupa Sepeda Motor sebanyak 10 unit sesuai Surat Keterangan Perubahan Kondisi BMN Nomor B-326/64741/PL.520/12/2024 tanggal 31 Desember 2024 senilai 164.363.999. Rincian aset peralatan dan mesin berupa sepeda

motor yang dihentikan penggunaannya dirinci sebagai berikut.

- Sepeda Motor merek Honda Mega Pro plat KT 2428 D tanggal perolehan 22 Juni 2009 senilai 17.476.999 dengan NUP 5 dalam kondisi rusak berat;
- Sepeda Motor merek Honda NF125 TD plat KT 2542 D tanggal perolehan 3 Mei 2010 senilai 12.732.000 dengan NUP 6 dalam kondisi rusak berat;
- Sepeda Motor merek HONDA/SUPRA X 125 TD plat KT 2882 D tanggal perolehan 7 Oktober 2011 senilai 14.945.000 dengan NUP 7 dalam kondisi rusak berat;
- Sepeda Motor merek HONDA/SUPRA X 125 TD plat KT 2883 D tanggal perolehan 7 Oktober 2011 senilai 14.945.000 dengan NUP 8 dalam kondisi rusak berat;
- Sepeda Motor merek NEW MEGA PRO SP plat KT 2889 D tanggal perolehan 7 Oktober 2011 senilai 18.845.000 dengan NUP 9 dalam kondisi rusak berat;
- Sepeda Motor merek Honda VERSA CW plat KT 2969 D tanggal perolehan 4 Desember 2013 senilai 17.880.000 dengan NUP 10 dalam kondisi rusak berat;
- Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 plat KT 2968 D tanggal perolehan 4 Desember 2013 senilai 16.820.000 dengan NUP 11 dalam kondisi rusak berat;
- Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 plat KT 2967 D tanggal perolehan 4 Desember 2013 senilai 16.820.000 dengan NUP 12 dalam kondisi rusak berat;
- Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 plat KT 2966 D tanggal perolehan 4 Desember 2013 senilai 16.820.000 dengan NUP 13 dalam kondisi rusak berat;
- Sepeda Motor merek SUPRA X 125 FI CW plat KT 2535 D tanggal perolehan 21 April 2015 senilai 17.080.000 dengan NUP 14 dalam kondisi rusak berat.

Peralatan dan Mesin lainnya yang ada di BPS Kota Bontang dalam kondisi baik dan digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi BPS Kota Bontang.

*Gedung dan
Bangunan
Rp2.874.089.197*

C.5 Gedung dan Bangunan

Nilai Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp2.874.089.197 dan Rp2.874.089.197. Mutasi transaksi terhadap Gedung dan Bangunan pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

**Saldo Nilai Perolehan Per
31 Desember 2023 2.874.089.197**

Mutasi Tambah :	
Total Mutasi Tambah :	<u>0</u>
Mutasi Kurang :	
Total Mutasi Kurang :	<u>0</u>
Kenaikan(Penurunan)	<u>0</u>
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	2.874.089.197
Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2024	(281.483.730)
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2024	2.592.605.467

Gedung dan Bangunan BPS Kota Bontang terdiri dari Bangunan Gedung Tempat Kerja di Jalan Awang Long No.2 Bontang Baru senilai Rp 2.574.717.197; Bangunan Gedung Tempat Tinggal di Jalan Dewi Sartika Bontang Baru senilai Rp 208.480.000; dan Pagar Permanen senilai Rp 90.892.000. Gedung dan Bangunan tersebut di atas dalam kondisi baik dan digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi BPS Kota Bontang.

*Aset Tetap Lainnya
Rp102.281.121*

C.6 Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Saldo Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp102.281.121 dan Rp102.281.121. Nilai mutasi atas aset tetap per 31 Desember 2024 disajikan pada tabel berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2023	102.281.121
Mutasi Tambah :	
Total Mutasi Tambah :	<u>0</u>
Mutasi Kurang :	
Total Mutasi Kurang :	<u>0</u>
Kenaikan(Penurunan)	<u>0</u>
Saldo Nilai Perolehan 31 Desember 2024	102.281.121
Akumulasi Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2024	0

**Nilai Buku sampai dengan
31 Desember 2024 102.281.121**

Aset tetap lainnya berupa bahan perpustakaan tercetak senilai Rp102.281.121. Per 31 Desember 2024 tidak terdapat mutasi tambah maupun mutasi kurang aset tetap lainnya. Aset tetap lainnya tersebut di atas dalam kondisi baik dan digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi BPS Kota Bontang.

*Akumulasi
Penyusutan Aset
Tetap
Rp1.933.513.704*

C.7 Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp1.933.513.704 dan Rp1.814.526.840. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang disusutkan selama masa manfaat aset yang bersangkutan selain untuk Tanah dan Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP). Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 15
Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap 31 Desember 2024*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan	Nilai Buku
Peralatan dan Mesin	2.235.895.972	1.652.029.974	583.865.998
Gedung dan Bangunan	2.874.089.197	281.483.730	2.592.605.467
Aset Tetap Lainnya	102.281.121	0	102.281.121
Jumlah	5.212.266.290	1.933.513.704	3.278.752.586

Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap disajikan pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Nilai Perolehan Aset Tetap sebesar Rp5.212.266.290 mengalami penyusutan sebesar Rp1.933.513.704 sampai dengan 31 Desember 2024. Nilai penyusutan ini disumbangkan dari akumulasi penyusutan peralatan dan mesin senilai Rp1.652.029.974 serta akumulasi penyusutan gedung dan bangunan senilai Rp281.483.730. Penyusutan ini menyebabkan per 31 Desember 2024 Nilai Buku Aset Tetap BPS Kota Bontang menjadi sebesar Rp3.278.752.586.

*Aset Tak Berwujud
Rp25.700.000*

C.8 Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud (ATB) per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp25.700.000 dan Rp25.700.000. Aset Tak

Berwujud merupakan aset yang dapat diidentifikasi dan dimiliki, tetapi tidak mempunyai wujud fisik. Aset Tak Berwujud pada berupa software yang digunakan untuk menunjang operasional kantor.

Rincian Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 16
Rincian Aset Tak Berwujud 31 Desember 2024

Uraian	Nilai Perolehan
Software	25.700.000
Jumlah	25.700.000

Mutasi transaksi terhadap Aset Tak Berwujud pada tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2023	25.700.000
Mutasi Tambah :	
Total Mutasi Tambah :	0
Mutasi Kurang :	
Total Mutasi Kurang :	0
Kenaikan(Penurunan)	0
Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2024	25.700.000
Akumulasi Amortisasi sampai dengan 31 Desember 2024	(25.700.000)
Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2024	0

Pada aset tidak berwujud, tidak terdapat mutasi penambahan maupun mutasi pengurangan per 31 Desember 2024. Adapun akumulasi amortisasi sampai dengan 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp25.700.000 sehingga nilai buku menjadi Rp 0.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya Rp27.583.170

C.9 Dana yang Dibatasi Penggunaannya

Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaannya per tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp27.583.170 dan Rp0. Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu. Saldo Dana yang Dibatasi Penggunaan berasal dari dana di rekening penampungan Kementerian/Lembaga.

Tabel 16A
Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Jenis	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023(Rp)
Dana Yang Dibatasi Penggunaannya	27.583.170	0
Jumlah	0	0

Tabel 16B
Rincian Dana yang Dibatasi Penggunaannya

No.	Uraian Transaksi	Nama Vendor/Rekanan	Tanggal Pembayaran	Nilai (Rp)
1.	Pengadaan Jasa Manajemen Building	CV. SANG SURYA WIJAYA	02/01/2025	27.583.170
Jumlah				27.583.170

Saldo Dana Yang Dibatasi Penggunaannya per 31 Desember 2024 sebesar Rp27.583.170 merupakan dana pada RPATA (Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran) yang digunakan untuk menampung pendanaan atas pekerjaan yang belum diserahkan pada akhir tahun 2024. Dana pada RPATA tersebut digunakan untuk membayar Belanja Barang Jasa Lainnya berupa Jasa Manajemen Building untuk periode Desember 2024 sesuai Kontrak Nomor 007/PPK/BPS-BONTANG/01/2024 yang dibayarkan pada Januari 2025 sebesar Rp27.583.170.

Penampungan dana RPATA atas Kontrak Nomor 007/PPK/BPS-BONTANG/01/2024 tanggal 12 Januari 2024 untuk pembayaran Pengadaan Jasa Manajemen Building kepada CV. SANG SURYA WIJAYA diajukan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Pengajuan Pembayaran Melalui Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran Nomor SPTJM-171/00446T/637237/2024 tanggal 18 Desember 2024 dan SPM Nomor 00446A tanggal 19 Desember 2024 sebesar Rp27.583.170.

Pembayaran dana RPATA atas Kontrak Nomor 007/PPK/BPS-BONTANG/01/2024 tanggal 12 Januari 2024 untuk Pengadaan Jasa Manajemen Building kepada CV. SANG SURYA WIJAYA diajukan menggunakan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak Atas Pembayaran Dana Kepada Rekening Penyedia Barang/Jasa Nomor SPTJM-172/00003T/637237/2025 tanggal 2 Januari 2025 dan SPM Nomor 00003A tanggal 2 Januari 2025 sebesar Rp27.583.170.

Aset Lain-lain
Rp197.458.499

C.10 Aset Lain-lain

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah Rp197.458.499 dan Rp0. Aset Lain-lain merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang berada dalam kondisi rusak berat dan tidak lagi digunakan dalam operasional entitas. Adapun mutasi aset lain-lain adalah sebagai berikut:

Mutasi Tambah :

Penghentiaan Aset Dari Penggunaan	197.458.499
--------------------------------------	-------------

Total Mutasi Tambah	197.458.499
----------------------------	--------------------

:

Mutasi Kurang :

Total Mutasi Kurang	0
----------------------------	----------

:

Kenaikan(Penurunan)	197.458.499
----------------------------	--------------------

Saldo Nilai Perolehan Per 31 Desember 2024	197.458.499
---	--------------------

Akumulasi

Penyusutan sampai dengan 31 Desember 2024	(197.458.499)
--	----------------------

Nilai Buku sampai dengan 31 Desember 2024	0
--	----------

Rincian Aset Lain-lain berdasarkan nilai perolehan, akumulasi penyusutan dan nilai buku tersaji pada Lampiran Laporan Keuangan ini.

Per 31 Desember 2024 terdapat mutasi tambah Aset Lain-Lain sebesar Rp197.458.499. Aset tambah ini diperoleh dari Penghentiaan Aset Dari Penggunaan sebesar Rp197.458.499. Beberapa penjelasan terkait mutasi tambah Aset Lain-Lain adalah sebagai berikut.

- a. Penghentian Aset dari Penggunaan berupa *Note Book* dengan kondisi rusak berat sebanyak 2 unit sesuai Surat Keterangan Perubahan Kondisi BMN Nomor B-327/64741/PL.520/12/2024 tanggal 31 Desember 2024 senilai Rp33.094.500. Rincian aset peralatan dan mesin berupa *Note Book* yang dihentikan penggunaannya dirinci sebagai berikut.
 - *Note Book* merek Lenovo/T4204177 tanggal perolehan 2 November 2011 senilai Rp17.584.500 dengan NUP 2 dalam kondisi rusak berat.

- *Note Book* merek Fujitsu/SH782 tanggal perolehan 30 Juni 2013 senilai Rp15.510.000 dengan NUP 3 dalam kondisi rusak berat.
- b. Penghentian Aset dari Penggunaan berupa Sepeda Motor sebanyak 10 unit sesuai Surat Keterangan Perubahan Kondisi BMN Nomor B-326/64741/PL.520/12/2024 tanggal 31 Desember 2024 senilai 164.363.999. Rincian aset peralatan dan mesin berupa sepeda motor yang dihentikan penggunaannya dirinci sebagai berikut.
- Sepeda Motor merek Honda Mega Pro plat KT 2428 D tanggal perolehan 22 Juni 2009 senilai 17.476.999 dengan NUP 5 dalam kondisi rusak berat;
 - Sepeda Motor merek Honda NF125 TD plat KT 2542 D tanggal perolehan 3 Mei 2010 senilai 12.732.000 dengan NUP 6 dalam kondisi rusak berat;
 - Sepeda Motor merek HONDA/SUPRA X 125 TD plat KT 2882 D tanggal perolehan 7 Oktober 2011 senilai 14.945.000 dengan NUP 7 dalam kondisi rusak berat;
 - Sepeda Motor merek HONDA/SUPRA X 125 TD plat KT 2883 D tanggal perolehan 7 Oktober 2011 senilai 14.945.000 dengan NUP 8 dalam kondisi rusak berat;
 - Sepeda Motor merek NEW MEGA PRO SP plat KT 2889 D tanggal perolehan 7 Oktober 2011 senilai 18.845.000 dengan NUP 9 dalam kondisi rusak berat;
 - Sepeda Motor merek Honda VERSA CW plat KT 2969 D tanggal perolehan 4 Desember 2013 senilai 17.880.000 dengan NUP 10 dalam kondisi rusak berat;
 - Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 plat KT 2968 D tanggal perolehan 4 Desember 2013 senilai 16.820.000 dengan NUP 11 dalam kondisi rusak berat;
 - Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 plat KT 2967 D tanggal perolehan 4 Desember 2013 senilai 16.820.000 dengan NUP 12 dalam kondisi rusak berat;
 - Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 plat KT 2966 D tanggal perolehan 4 Desember 2013 senilai 16.820.000 dengan NUP 13 dalam kondisi rusak berat;
 - Sepeda Motor merek SUPRA X 125 FI CW plat KT 2535 D tanggal perolehan 21 April 2015 senilai 17.080.000 dengan NUP 14 dalam kondisi rusak berat.

Nilai akumulasi penyusutan Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp197.458.499. Sehingga nilai buku Aset Lain-Lain per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0.

*Akumulasi
Penyusutan dan
Amortisasi Aset
Lainnya
Rp223.158.499*

C.11 Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya

Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing Rp223.158.499 dan Rp25.700.000. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya merupakan kontra akun Aset Lainnya yang disajikan berdasarkan pengakumulasian atas penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat Aset Lainnya. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

*Tabel 17
Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Lainnya*

Aset Tetap	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/Amortisasi	Nilai Buku
Software	25.700.000	25.700.000	0
Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	197.458.499	197.458.499	0
Jumlah	223.158.499	223.158.499	0

Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.

Per 31 Desember 2024 nilai akumulasi penyusutan/amortisasi sebesar Rp223.158.499. Nilai penyusutan ini disumbang dari penyusutan/amortisasi *software* sebesar Rp25.700.000 dan penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan sebesar Rp197.458.499. Nilai penyusutan Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan dirinci sebagai berikut sesuai Surat Keterangan Perubahan Kondisi BMN Nomor B-327/64741/PL.520/12/2024 tanggal 31 Desember 2024 dan Surat Keterangan Perubahan Kondisi BMN Nomor B-326/64741/PL.520/12/2024 tanggal 31 Desember.

Tabel 17A
Rincian Akumulasi Penyusutan dan Amortisasi Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan

No.	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam Operasi Pemerintahan	Nilai Perolehan	Akumulasi Penyusutan/ Amortisasi	Nilai Buku
1	Note Book merek Lenovo/T4204177	17.584.500	17.584.500	0
2	Note Book merek Fujitsu/SH782	15.510.000	15.510.000	0
3	Sepeda Motor merek Honda Mega Pro plat KT 2428 D	17.476.999	17.476.999	0
4	Sepeda Motor merek Honda NF125 TD plat KT 2542 D	12.732.000	12.732.000	0
5	Sepeda Motor merek HONDA/SUPRA X 125 TD plat KT 2882 D	14.945.000	14.945.000	0
6	Sepeda Motor merek HONDA/SUPRA X 125 TD plat KT 2883 D	14.945.000	14.945.000	0
7	Sepeda Motor merek NEW MEGA PRO SP plat KT 2889 D	18.845.000	18.845.000	0
8	Sepeda Motor merek Honda VERSA CW plat KT 2969 D	17.880.000	17.880.000	0
9	Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 plat KT 2968 D	16.820.000	16.820.000	0
10	Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 plat KT 2967 D	16.820.000	16.820.000	0
11	Sepeda Motor merek Honda Supra X 125 plat KT 2966 D	16.820.000	16.820.000	0
12	Sepeda Motor merek SUPRA X 125 FI CW plat KT 2535 D	17.080.000	17.080.000	0
Jumlah		197.458.499	197.458.499	0

Utang kepada Pihak Ketiga
Rp138.280.788

C.12 Utang kepada Pihak Ketiga

Nilai Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 masing-masing sebesar Rp138.280.788 dan Rp100.257.612. Utang kepada Pihak Ketiga merupakan kewajiban yang masih harus dibayar dan segera diselesaikan kepada pihak ketiga lainnya dalam waktu kurang dari 12 (dua belas bulan) sejak tanggal pelaporan. Adapun rincian Utang Pihak Ketiga pada BPS Kota Bontang per tanggal pelaporan adalah sebagai berikut:

Tabel 18
Rincian Utang Pada Pihak Ketiga 2024 dan 2023

Jenis	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	107.079.279	99.046.273
Belanja Barang yang Masih Harus Dibayar	3.618.339	1.211.339
Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya	27.583.170	0
Jumlah	138.280.788	100.257.612

- a. Belanja pegawai yang masih harus dibayar sebesar Rp107.079.279 terdiri atas Belanja Tunjangan Kinerja Bulan Desember 2024 dengan rincian berikut.
- Belanja tunjangan kinerja susulan PNS bulan Desember 2024 untuk 20 pegawai sebesar Rp98.973.729.
 - Belanja tunjangan kinerja susulan PNS bulan Desember 2024 untuk 1 pegawai sebesar Rp4.595.150.
 - Belanja tunjangan kinerja susulan PPPK bulan Desember 2024 untuk 1 pegawai sebesar Rp3.510.400.
- b. Belanja barang yang masih harus dibayar sebesar Rp3.618.339 terdiri atas Belanja Langganan Internet, Langganan Air, dan Langganan Telepon Bulan Desember 2024 dengan rincian berikut.
- Belanja langganan internet bulan Desember 2024 sebesar Rp3.361.857.
 - Belanja langganan air bulan Desember 2024 sebesar Rp224.625.
 - Belanja langganan telepon bulan Desember 2024 sebesar Rp31.857.
- c. Utang kepada Pihak Ketiga Lainnya sebesar Rp27.583.170 berupa utang yang belum diterima tagihannya dari belanja barang Jasa Lainnya berupa pengadaan jasa Manajemen Building bulan Desember 2024 sesuai Kontrak Nomor 007/PPK/BPS-BONTANG/01/2024 sebesar Rp27.583.170 yang akan dibayarkan pada Januari 2025. Anggaran belanja ini per 31 Desember 2024 ditampung melalui RPATA (Rekening Penampungan Akhir Tahun Anggaran) sebesar Rp27.583.170.

Ekuitas
Rp4.736.833.782

C.13 Ekuitas

Ekuitas per 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.736.833.782 dan Rp4.972.554.364. Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D.PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN OPERASIONAL

Pendapatan PNBP
Rp1.921.652

D.1 Pendapatan Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp1.921.652 dan Rp1.951.640. Pendapatan tersebut terdiri dari:

Tabel 19
Rincian Pendapatan Negara Bukan Pajak 31 Desember 2024 dan
31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun)%
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.921.652	1.921.644	0,00
Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	29.996	(100,00)
Jumlah	1.921.652	1.951.640	(1,54)

Berdasarkan Keputusan KPA BPS Provinsi Kalimantan Timur Nomor 36 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Keputusan KPA BPS Provinsi Kalimantan Timur Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penunjukan Penghunian Rumah Negara di Lingkungan BPS Provinsi Kalimantan Timur 2024 biaya sewa rumah dinas BPS Kota Bontang yang terletak di Jalan Dewi Sartika Bontang Baru adalah sebesar Rp160.137.

Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan senilai Rp1.921.652 berasal dari sewa rumah dinas pejabat Eselon III yang terletak di Jalan Dewi Sartika, Kota Bontang. Nilai PNBP ini diperoleh dari biaya sewa rumah dinas selama Januari sampai dengan Desember 2024 sebesar Rp1.921.652.

Terdapat kenaikan Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan per 31 Desember 2024 dibanding per 31 Desember 2023. Kenaikan sebesar Rp8 per 31 Desember 2024 disebabkan adanya lebih bayar sebesar Rp8 pada pembayaran kekurangan sewa rumah dinas bulan Juli dan Agustus 2024 yang disetor melalui SIMPONI dengan NTB 904788081548 dan NTPN 5DDC32G4VQ3VEHR5 tanggal 16 Oktober 2024 sebesar Rp73.234.

Penurunan Pendapatan Negara Bukan Pajak per 31 Desember 2024 dibanding 31 Desember 2023 disumbangkan oleh menurunnya Pendapatan Anggaran Lain-Lain pada Tahun Anggaran 2024. Pada Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat Pendapatan Anggaran Lain-Lain. Sedangkan, pada Tahun Anggaran 2023 Pendapatan Anggaran Lain-Lain diperoleh dari koreksi transaksi pengembalian UP 2023 senilai Rp29.996 dari SPM GUP Nihil Nomor 00370A tanggal 14 Desember 2023. Koreksi transaksi dikonfirmasi melalui Surat KPPN

Nomor S-23/KPN.2001/2024 dengan Nota Perbaikan Transaksi Penerimaan Negara Nomor 046/12/2023 tanggal 4 Januari 2024.

Tabel 20
Perbandingan Nilai LO dan LRA Pendapatan Negara Bukan Pajak Sampai 31 Desember 2024

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	1.921.652	1.921.652	0
Pendapatan Anggaran Lain-lain	0	0	0
Jumlah	1.921.652	1.921.652	0

Nilai Laporan operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran PNBPN Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan serta Pendapatan Anggaran Lain-lain per 31 Desember 2024 adalah sama. Sehingga tidak terdapat selisih antara nilai LO dan LRA.

Beban Pegawai
Rp2.999.680.26
9

D.2 Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Tahun 2024 dan 2023 adalah masing-masing sebesar Rp2.999.680.269 dan Rp2.716.789.996. Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

Tabel 21
Rincian Beban Pegawai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun)%
Beban Gaji Pokok PNS	989.345.742	901.557.180	9,74
Beban Pembulatan Gaji PNS	15.729	18.162	(13,40)
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	70.600.350	55.765.770	26,60
Beban Tunj. Anak PNS	15.389.320	12.915.794	19,15
Beban Tunj. Struktural PNS	26.460.000	19.260.000	37,38
Beban Tunj. Fungsional PNS	136.380.000	123.420.000	10,50
Beban Tunj. PPh PNS	75.900.577	1.730.395	4.286,32
Beban Tunj. Beras PNS	51.128.520	47.652.360	7,29
Beban Uang Makan PNS	158.695.000	140.235.000	13,16
Beban Tunjangan Umum PNS	7.339.950	13.990.000	(47,53)

Beban Gaji Pokok PPPK	34.305.600	0	0,00
Beban Pembulatan Gaji PPPK	905	0	0,00
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	4.320.000	0	0,00
Beban Tunjangan Beras PPPK	869.040	0	0,00
Beban Uang Makan PPPK	6.405.000	0	0,00
Beban Uang Lembur	15.272.000	110.189.000	(86,14)
Beban Uang Lembur PPPK	1.434.000	0	0,00
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja)	1.367.127.203	1.290.056.335	5,97
Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	38.691.333	0	0,00
Jumlah	2.999.680.269	2.716.789.996	10,41

Beban Pegawai per 31 Desember 2024 mengalami peningkatan sebesar 10,41 persen dibandingkan 31 Desember 2023. Beberapa penjelasan terkait beban pegawai diuraikan sebagai berikut.

- a. Secara umum peningkatan Beban Gaji Pokok PNS, Beban Tunj. PPh PNS, Beban Tunj. Beras PNS, Beban Uang Makan PNS, dan Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) disebabkan oleh penambahan pegawai PNS di BPS Kota Bontang.
- b. Peningkatan Beban Tunj. PPh PNS sebesar 4286,32 persen disebabkan karena adanya perubahan akun yang digunakan untuk belanja Tunjangan PPh PNS yang semula menggunakan akun 512411 (Belanja Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) menjadi akun 511125 (Belanja Tunj. PPh PNS) per Januari 2024.
- c. Peningkatan Beban Tunj. Struktural PNS sebesar 37,38 persen disebabkan karena adanya formasi lengkap Kepala BPS Kota Bontang dan Kasubag Umum BPS Kota Bontang selama Tahun Anggaran 2024. Pada Maret 2023, Kasubag Umum BPS Kota Bontang mengalami mutasi keluar sehingga diganti oleh Plt. Kasubag Umum. Adapun Kepala Subbagian Umum BPS Kota Bontang yang baru diputuskan kembali dengan SK per 1 Januari 2024.
- d. Peningkatan Beban Tunj. Fungsional PNS sebesar 10,50 persen disebabkan oleh penambahan jumlah pegawai dengan jabatan fungsional. Penambahan ini disebabkan oleh beberapa pegawai yang beralih jabatan dari pelaksana menjadi fungsional, serta CPNS yang sudah diangkat menjadi PNS dengan jabatan fungsional tertentu.

- e. Peningkatan Beban Tunj. Suami/Istri PNS sebesar 26,60 persen disebabkan beberapa pegawai yang melangsungkan pernikahan di Tahun Anggaran 2024.
- f. Peningkatan Beban Tunj. Anak PNS sebesar 19,15 persen disebabkan bertambahnya jumlah anak yang menjadi tanggungan pegawai BPS Kota Bontang di Tahun Anggaran 2024.
- g. Peningkatan Beban Gaji Pokok PPPK, Beban Pembulatan Gaji PPPK, Beban Tunjangan Fungsional PPPK, Beban Tunjangan Beras PPPK, Beban Uang Makan PPPK, Beban Pegawai Tunjangan Khusus/ Kegiatan/ Kinerja PPPK disebabkan oleh adanya Pegawai PPPK baru di BPS Kota Bontang yang aktif per Maret 2024.
- h. Penurunan Beban Uang Lembur sebesar 86,14 persen disebabkan menurunnya kebutuhan penyelesaian pekerjaan di luar jam kerja selama Tahun Anggaran 2024.
- i. Penurunan Beban Tunjangan Umum PNS sebesar 47,53 persen disebabkan adanya perubahan jabatan beberapa pegawai dari jabatan pelaksana menjadi fungsional.

Tabel 22
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pegawai Sampai 31
Desember 2024

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Gaji Pokok PNS	989.345.742	989.345.742	0
Beban Pembulatan Gaji PNS	15.729	15.729	0
Beban Tunj. Suami/Istri PNS	70.600.350	70.600.350	0
Beban Tunj. Anak PNS	15.389.320	15.389.320	0
Beban Tunj. Struktural PNS	26.460.000	26.460.000	0
Beban Tunj. Fungsional PNS	136.380.000	136.380.000	0
Beban Tunj. PPh PNS	75.900.577	75.900.577	0
Beban Tunj. Beras PNS	51.128.520	51.128.520	0
Beban Uang Makan PNS	158.695.000	158.695.000	0
Beban Tunjangan Umum PNS	7.339.950	7.339.950	0
Beban Gaji Pokok PPPK	34.305.600	34.305.600	0
Beban Pembulatan Gaji PPPK	905	905	0
Beban Tunjangan Fungsional PPPK	4.320.000	4.320.000	0
Beban Tunjangan Beras PPPK	869.040	869.040	0
Beban Uang Makan PPPK	6.405.000	6.405.000	0
Beban Uang Lembur	15.272.000	15.272.000	0
Beban Uang Lembur PPPK	1.434.000	1.434.000	0
Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan/Kinerja)	1.367.127.203	1.362.604.597	4.522.606

Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK	38.691.333	35.180.933	3.510.400
Jumlah	2.999.680.269	2.991.647.263	8.033.006

Berikut merupakan rincian penyebab selisih nilai LO dan LRA Beban Pegawai per 31 Desember 2024:

- Selisih LO dan LRA Beban Pegawai (Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja) sebesar Rp4.522.606 merupakan selisih Pembayaran Tunjangan Kinerja Bulan Desember Tahun 2023 yang dibayarkan bulan Januari 2024 senilai (Rp99.046.273) dengan Pembayaran Tunjangan Kinerja Bulan Desember Tahun 2024 yang dibayarkan pada bulan Januari 2025 senilai Rp103.568.879.
- Selisih LO dan LRA Beban Pegawai Tunjangan Khusus/Kegiatan/Kinerja PPPK sebesar Rp3.510.400 disebabkan adanya beban Tunjangan Kinerja PPPK Bulan Desember Tahun 2024 yang akan dibayarkan pada bulan Januari 2025 senilai Rp3.510.400.

*Beban Persediaan
Rp164.669.839*

D.3 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan sampai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp164.669.839 dan Rp198.531.420. Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan. Rincian Beban Persediaan untuk 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

*Tabel 23
Rincian Beban Persediaan 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik(Turun)%
Beban Persediaan konsumsi	164.669.839	198.531.420	(17,06)
Jumlah	164.669.839	198.531.420	(17,06)

Beban Persediaan Konsumsi per 31 Desember 2024 mengalami penurunan dibandingkan 31 Desember 2023 sebesar 17,06 persen. Penurunan ini salah satunya disebabkan oleh menurunnya anggaran belanja barang di Tahun Anggaran 2024 yang kemudian berpengaruh terhadap konsumsi barang persediaan. Penurunan anggaran belanja barang disebabkan oleh berkurangnya jumlah kegiatan besar yang dilaksanakan di Tahun Anggaran 2024, adanya transisi metode

pelatihan petugas secara hibrid melalui pembelajaran mandiri, serta perubahan moda pendataan pada beberapa survei dari PAPI ke CAPI.

*Beban Barang dan
Jasa
Rp1.171.617.843*

D.4 Beban Barang dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp1.171.617.843 dan Rp1.798.688.395. Beban Barang dan Jasa terdiri dari beban barang dan jasa berupa konsumsi atas barang dan/atau jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas serta beban lain-lain berupa beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

*Tabel 24
Rincian Beban Barang dan Jasa sampai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun)%
Beban Keperluan Perkantoran	29.188.950	236.264.587	(87,65)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	57.240.000	97.752.000	(41,44)
Beban Barang Operasional Lainnya	27.120.000	0	0,00
Beban Bahan	33.714.000	164.214.750	(79,47)
Beban Honor Output Kegiatan	578.303.000	1.138.960.501	(49,23)
Beban Barang Non Operasional Lainnya	440.235	2.188.339	(79,88)
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1.710.000	6.993.000	(75,55)
Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	24.960.000	15.824.160	57,73
Beban Langganan Listrik	51.412.660	49.540.156	3,78
Beban Langganan Telepon	402.284	412.284	(2,43)
Beban Langganan Air	2.469.000	3.614.625	(31,69)
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	33.659.674	0	0,00
Beban Sewa	0	18.301.355	(100,00)
Beban Jasa Profesi	0	16.000.000	(100,00)
Beban Jasa Lainnya	330.998.040	48.622.638	580,75
Jumlah	1.171.617.843	1.798.688.395	(34,86)

Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 34,86 persen dibandingkan dengan kondisi per 31 Desember 2023. Beberapa penjelasan terkait Beban Barang dan Jasa diuraikan sebagai berikut.

- a. Secara umum, penurunan Beban Keperluan Perkantoran, Beban Honor Operasional Satuan Kerja, Beban Bahan, Beban Honor Output Kegiatan, Beban Barang Non Operasional Lainnya disebabkan karena menurunnya anggaran belanja barang pada Tahun Anggaran 2024. Penurunan anggaran belanja barang ini berkaitan dengan menurunnya jumlah kegiatan besar yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2024. Selain itu dipengaruhi juga berkurangnya pencetakan instrumen survei karena beralih ke *softfile*, serta perubahan moda pendataan pada beberapa survei dari PAPI ke CAPI.
- b. Meningkatnya Beban Barang Operasional Lainnya sebesar 0,00 persen dikarenakan pada Tahun Anggaran 2024 terdapat pengadaan pakaian seragam pegawai sesuai kuitansi No. 562301 tanggal 25 April 2024 senilai Rp25.990.000 dan pembayaran pembuatan pakaian seragam untuk PPPK sesuai SPBY No. 00132/PB/637237/2024 tanggal 13 Agustus 2024 senilai Rp1.130.000.
- c. Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel mengalami penurunan sebesar 75,55 persen disebabkan oleh menurunnya pembelian peralatan dan mesin di bawah nilai kapitalisasi per 31 Desember 2024 dibanding per 31 Desember 2023. Pada Tahun Anggaran 2024 pembelian peralatan dan mesin dibawah nilai kapitalisasi berupa *router* dengan SPBY No. 00164/PB/637237/2024 tanggal 4 September 2024 senilai Rp1.710.000.
- d. Beban Gedung dan Bangunan – Ekstrakomptabel mengalami peningkatan sebesar 57,73 persen disebabkan adanya pembuatan Kanopi di BPS Kota Bontang pada Tahun Anggaran 2024. Pembayaran Belanja Barang Berupa Biaya Pembuatan Kanopi di bawah nilai kapitalisasi sesuai *invoice* No. 101/INV.GR/12/2024 tgl 10 Desember 2024 dengan BAST No. 448/PPK/BPS-BONTANG/12/2024 tanggal 10 Desember 2024 senilai Rp24.960.000.
- e. Beban Langganan Listrik meningkat sebesar 3,78 persen karena adanya peningkatan konsumsi listrik untuk mendukung terselenggarakannya kegiatan di BPS Kota Bontang selama Tahun Anggaran 2024. Hal ini terjadi salah satunya disebabkan oleh bertambahnya jumlah perangkat komputer yang ada di BPS Kota Bontang pada Tahun Anggaran 2024.

- f. Beban Langganan Telepon mengalami penurunan sebesar 2,43 persen per 31 Desember 2024 dibandingkan per 31 Desember 2023. Penurunan ini disebabkan oleh perubahan mekanisme pembayaran tagihan telepon yang dibayar bersamaan dengan tagihan internet. Sehingga, biaya admin pembayaran masuk ke akun Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya sebagai bagian dari tagihan internet bulanan. Penggunaan telepon hingga 31 Desember 2024 masih konstan atau tidak terdapat perubahan pola konsumsi.
- g. Penurunan Beban Langganan Air sebesar 31,69 persen disebabkan oleh penurunan konsumsi air hingga 31 Desember 2024 dibandingkan per 31 Desember 2023. Hal ini salah satunya disebabkan oleh berkurangnya kegiatan besar yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2024 jika dibandingkan pada periode yang sama di Tahun Anggaran 2023.
- h. Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya mengalami peningkatan sebesar 0,00 persen karena adanya perubahan akun yang dipakai dalam mencatat pembayaran tagihan internet bulanan. Perubahan ini dilakukan dari menggunakan akun Beban Keperluan Perkantoran pada tahun anggaran sebelumnya menjadi Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya. Selain itu, hingga 31 Desember 2024, BPS Kota Bontang melakukan penambahan daya internet yang turut meningkatkan nilai Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya.
- i. Penurunan Beban Sewa sebesar 100,00 persen disebabkan tidak adanya belanja sewa selama Tahun Anggaran 2024.
- j. Penurunan Beban Jasa Profesi sebesar 100,00 persen disebabkan tidak adanya belanja jasa profesi selama Tahun Anggaran 2024.
- k. Peningkatan Beban Jasa Lainnya sebesar 580,75 persen disebabkan karena adanya penggunaan Jasa Manajemen Building selama Tahun Anggaran 2024. Adapun jasa manajemen building yang digunakan ini mencakup jasa keamanan dan jasa kebersihan kantor.

Tabel 25
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Barang dan Jasa Sampai 31 Desember 2024

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Keperluan Perkantoran	29.188.950	30.934.293	(1.745.343)
Beban Honor Operasional Satuan Kerja	57.240.000	57.240.000	0
Beban Barang Operasional Lainnya	27.120.000	27.120.000	0
Beban Bahan	33.714.000	33.714.000	0

Beban Honor Output Kegiatan	578.303.000	578.303.000	0
Beban Barang Non Operasional Lainnya	440.235	440.235	0
Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1.710.000	1.710.000	0
Beban Gedung dan Bangunan - Ekstrakomptabel	24.960.000	24.960.000	0
Beban Langganan Listrik	51.412.660	59.558.100	(8.145.440)
Beban Langganan Telepon	402.284	404.784	(2.500)
Beban Langganan Air	2.469.000	2.388.000	81.000
Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya	33.659.674	30.297.817	3.361.857
Beban Sewa	0	0	0
Beban Jasa Profesi	0	0	0
Beban Jasa Lainnya	330.998.040	330.998.040	0
Jumlah	1.171.617.843	1.178.068.269	(6.450.426)

Berikut merupakan rincian penyebab selisih nilai LO dan LRA Beban Barang dan Jasa per 31 Desember 2024:

- a. Selisih LO dan LRA Beban Keperluan Perkantoran sebesar (Rp1.745.343) disebabkan oleh beberapa hal sebagai berikut.
 - Pembayaran Langganan Internet bulan Desember 2023 di bulan Januari 2024 sebesar (Rp1.033.357).
 - Nilai sisa langganan *Domain Web* per 31 Desember 2024 selama 174 hari hingga 23 Juni 2025 senilai (Rp70.224).
 - Nilai sisa langganan *Zoom Premium* per 31 Desember 2024 selama 145 hari hingga 25 Mei 2025 senilai (Rp641.762).
- b. Selisih LO dan LRA Beban Langganan Listrik sebesar (Rp8.145.440) merupakan selisih sisa token listrik per 31 Desember 2023 senilai Rp3.522.137 dengan sisa token listrik per 31 Desember 2024 senilai (Rp11.667.577).
- c. Selisih LO dan LRA Beban Langganan Telepon sebesar (Rp2.500) merupakan selisih beban langganan telepon bulan Desember 2023 yang dibayarkan pada bulan Januari 2024 senilai (Rp34.357) dengan beban langganan telepon bulan

Desember 2024 yang dibayarkan pada bulan Januari 2025 senilai Rp31.857.

- d. Selisih LO dan LRA Beban Langganan Air sebesar Rp81.000 merupakan selisih beban langganan air bulan Desember 2023 yang dibayarkan pada bulan Januari 2024 senilai (Rp143.625) dengan beban langganan air bulan Desember 2024 yang dibayarkan pada bulan Januari 2025 senilai Rp224.625
- e. Selisih LO dan LRA Beban Langganan Daya dan Jasa Lainnya sebesar Rp3.361.857 disebabkan adanya beban langganan daya dan jasa lainnya berupa langganan internet bulan Desember 2024 yang akan dibayarkan tagihannya pada bulan Januari 2025 senilai Rp3.361.857.

*Beban
Pemeliharaan
Rp71.101.972*

D.5 Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp71.101.972 dan Rp125.190.678. Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

*Tabel 26
Rincian Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023*

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun)%
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.275.000	63.984.100	(60,50)
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38.996.053	53.734.878	(27,43)
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	6.830.919	7.471.700	(8,58)
Jumlah	71.101.972	125.190.678	(43,21)

Beban Pemeliharaan per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 43,21 persen yang disumbang dari Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan, Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin, dan Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan. Penurunan ini disebabkan oleh lebih sedikitnya perbaikan yang dilakukan terhadap aset seperti gedung, halaman, peralatan dan mesin, serta lebih sedikitnya penggunaan persediaan bahan untuk pemeliharaan di BPS Kota Bontang per 31 Desember 2024 dibanding per 31 Desember 2023.

Tabel 27
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Pemeliharaan Sampai 31 Desember 2024

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	25.275.000	25.275.000	0
Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	38.996.053	38.996.053	0
Beban Persediaan bahan untuk pemeliharaan	6.830.919	0	6.830.919
Jumlah	71.101.972	64.271.053	6.830.919

Beban pemeliharaan senilai Rp6.830.919 yang disajikan di Laporan Operasional berasal dari pemakaian persediaan untuk pemeliharaan yang diperoleh dari realisasi belanja persediaan barang pemeliharaan, sedangkan nilai LRA sebesar Rp0 pada akun Beban bahan persediaan untuk pemeliharaan berdasarkan akuntansi berbasis akrual tidak menimbulkan beban pemeliharaan pada Laporan Operasional.

Pemakaian persediaan untuk pemeliharaan tidak menimbulkan beban persediaan bahan untuk pemeliharaan karena pencatatan kode barang dalam aplikasi persediaan menggunakan kode barang bahan pemeliharaan tetapi realisasi anggaran belanjanya menggunakan akun belanja persediaan barang konsumsi, bukan belanja pemeliharaan.

Beban Perjalanan Dinas
Rp472.120.732

D.6 Beban Perjalanan Dinas

Beban Perjalanan Dinas sampai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp472.120.732 dan Rp781.499.633. Beban tersebut merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

Tabel 28
Rincian Perjalanan Dinas sampai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun)%
Beban Perjalanan Biasa	298.993.132	319.850.299	(6,52)
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.990.000	36.522.000	(56,22)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	151.206.000	410.019.000	(63,12)
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.931.600	15.108.334	(60,74)
Jumlah	472.120.732	781.499.633	(39,59)

Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 39,59 persen dibanding per 31 Desember 2023. Penurunan ini disumbang oleh Beban Perjalanan Biasa, Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota, Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota, dan Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota. Secara umum, penurunan Beban Perjalanan Dinas disebabkan karena menurunnya anggaran belanja barang pada Tahun Anggaran 2024. Penurunan anggaran belanja barang ini berkaitan dengan menurunnya jumlah kegiatan besar yang dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2024. Selain itu dipengaruhi juga oleh adanya transisi metode pelatihan petugas secara hibrid melalui pembelajaran mandiri.

Selain itu, penurunan beban perjalanan dinas disebabkan oleh penghematan anggaran belanja perjalanan dinas sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-1023/MK.02/2024 tanggal 7 November 2024 yang ditindaklanjuti melalui Surat Sestama Nomor B-928/02000/PR.400/2024 tanggal 8 November 2024 tentang Penghematan Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Badan Pusat Statistik TA 2024.

Tabel 29
Perbandingan Nilai LO dan LRA Beban Perjalanan Dinas Sampai 31 Desember 2024

Uraian	Nilai LO	Nilai LRA	Selisih
Beban Perjalanan Biasa	298.993.132	298.993.132	0
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	15.990.000	15.990.000	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	151.206.000	151.206.000	0
Beban Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota	5.931.600	5.931.600	0
Jumlah	472.120.732	472.120.732	0

Tidak terdapat selisih nilai LO dan LRA Beban Perjalanan Dinas per 31 Desember 2024.

Beban Penyusutan dan Amortisasi
Rp316.445.363

D.7 Beban Penyusutan dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi sampai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp316.445.363 dan Rp299.961.582. Beban Penyusutan merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang

bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

Tabel 30
Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi Sampai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun)%
Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	258.332.063	238.635.782	8,25
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	58.113.300	58.113.300	0,00
Beban Amortisasi Software	0	3.212.500	(100,00)
Jumlah	316.445.363	299.961.582	5,50

Beban penyusutan dan amortisasi mengalami kenaikan sebesar 5,50 persen, Perubahan ini disumbangkan oleh meningkatnya beban penyusutan peralatan dan mesin, serta penurunan beban amortisasi *software* karena berkurangnya masa manfaat aset dan penghentian aset dari penggunaan.

Surplus dari Kegiatan Non Operasional Rp1.280.000

D.8 Kegiatan Non Operasional

Pos dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus dari Kegiatan Non Operasional sampai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 31
Rincian Kegiatan Non Operasional sampai 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023

Uraian	31 Desember 2024	31 Desember 2023	Naik (Turun)%
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			
Beban Pelepasan Aset Non Lancar			
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan	1.280.000	0	0,00
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya			
Beban Persediaan Rusak/Usang	0	29.812.848	(100,00)
Jumlah	1.280.000	(29.812.848)	(104,29)

Beberapa penjelasan terkait Pos Kegiatan Non Operasional diuraikan sebagai berikut.

- a. Per 31 Desember 2024, tidak terdapat Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar, Beban Pelepasan Aset Non Lancar, dan Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya.
- b. Per 31 Desember 2024, terdapat surplus pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya berupa Pendapatan Penyesuaian Nilai Persediaan sebesar Rp1.280.000. Nilai ini diperoleh dari Koreksi Kuantitas Tambah barang persediaan sebesar Rp1.280.000 terdiri atas koreksi atas kesalahan perekaman kuantitas barang konsumsi Ordner dan Map berupa Map Biola sebanyak 400 buah senilai Rp1.280.000.
- c. Nilai Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya berupa Beban Persediaan Rusak/Usang per 31 Desember 2024 mengalami penurunan sebesar 100,00 persen dibanding per 31 Desember 2023. Hal ini disebabkan karena pada Tahun Anggaran 2024 tidak terdapat Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya. Sedangkan pada Tahun Anggaran 2023 terdapat Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya berupa Beban Persediaan Rusak/Usang senilai Rp29.812.848. Persediaan usang ini diajukan dengan BAST No B-235/64741/PL.810/06/2023 Tanggal 27 Juni 2023 dan disahkan melalui Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 751 Tahun 2023 tentang Penghapusan BMN BPS di Wilayah Kalimantan Timur pada tanggal 6 November 2023 dengan rincian sebagai berikut.
 - 4800 set Kueisoner K Regsosek 2022 senilai Rp 5.280.000;
 - 41 unit Buku 1E (Pedoman Kortim) senilai Rp 561.700;
 - 170 unit Buku 1F (Pedoman Pencacahan) senilai Rp 2.261.000;
 - 40 unit Buku 1G (Pedoman Pengkodean) senilai Rp 396.000;
 - 113 unit Rompi Petugas SP2020 senilai Rp 9.281.481;
 - 17.313 unit Kuesioner CI SP2020 I senilai Rp 10.491.678;
 - 141 unit Kuesioner RC1 SP2020 I senilai Rp 19.881;
 - 10 unit Box Besar 2 SP2020 I senilai Rp 201.560;
 - 259 unit Box sedang SP2020 I senilai Rp 1.225.588;
 - 30 unit Box kecil SP2020 I senilai Rp 93.960.

E. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Ekuitas Awal
Rp4.972.554.364

E.1 Ekuitas Awal

Nilai ekuitas pada tanggal 1 Januari 2024 dan 1 Januari 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.972.554.364 dan Rp4.670.320.299.

Nilai Ekuitas Awal tersebut mengalami peningkatan pada 1 Januari 2024 apabila dibandingkan dengan 1 Januari 2023.

Defisit LO
Rp5.192.434.366

E.2 Surplus (Defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp5.192.434.366 dan Rp5.948.522.912. Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non operasional, dan pos luar biasa.

Transaksi Antar Entitas
Rp4.956.713.784

E.4 Transaksi Antar Entitas

Nilai Transaksi Antar Entitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.956.713.784 dan Rp6.250.756.977. Transaksi antar Entitas adalah transaksi yang melibatkan dua atau lebih entitas yang berbeda baik internal KL, antar KL, antar BUN maupun KL dengan BUN.

Tabel 32
Rincian Nilai Transaksi Antar Entitas

Jenis	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023(Rp)
Ditagihkan ke Entitas Lain	4.892.697.247	6.181.068.269
Diterima dari Entitas Lain	(1.921.652)	(1.951.640)
Transfer Masuk	65.938.189	71.640.348
Jumlah	4.956.713.784	6.250.756.977

Beberapa penjelasan terkait Nilai Transaksi antar Entitas diuraikan sebagai berikut.

- a. Transaksi yang ditagihkan ke entitas lain senilai Rp4.892.697.247 merupakan realisasi anggaran yang diajukan ke KPPN Samarinda s.d. 31 Desember 2024.
- b. Transaksi yang diterima dari entitas lain sebesar (Rp1.921.652) diperoleh dari Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN

berupa Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berupa sewa rumah dinas bulan Januari-Desember 2024 sebesar (Rp1.921.652).

- c. Transfer Masuk senilai Rp65.938.189 merupakan transfer persediaan berupa barang konsumsi dari BPS Provinsi Kalimantan Timur.

E.4.1 Diterima dari Entitas Lain (DDEL)/Ditagihkan ke Entitas Lain (DKEL)

Diterima dari Entitas Lain/Ditagihkan ke Entitas Lain merupakan transaksi antar entitas atas pendapatan dan belanja pada satuan kerja yang melibatkan kas negara (BUN). Pada periode hingga 31 Desember 2024, DDEL sebesar minus Rp1.921.652 sedangkan DKEL sebesar Rp4.892.697.247.

Nilai Diterima Dari Entitas Lain (DDEL) sebesar (Rp1.921.652) diperoleh dari Pendapatan dari Penjualan, Pengelolaan BMN, Iuran Badan Usaha dan Penerimaan Klaim Asuransi BMN berupa Pendapatan Sewa Tanah, Gedung dan Bangunan berupa sewa rumah dinas bulan Januari-Desember 2024 sebesar (Rp1.921.652).

Nilai Ditagihkan Ke Entitas Lain (DKEL) sebesar Rp4.892.697.247 berasal dari realisasi belanja netto hingga 31 Desember 2024 dengan rincian realisasi Belanja Pegawai netto sebesar Rp2.991.647.263, realisasi Belanja Barang netto Rp1.805.049.984, dan realisasi Belanja Modal netto sebesar Rp96.000.000.

E.4.2 Transfer Masuk/Transfer Keluar

Transfer Masuk/Transfer Keluar merupakan perpindahan aset/kewajiban dari satu entitas ke entitas lain pada internal KL, antar KL dan antara KL dengan BA-BUN. Transfer Masuk sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp65.938.189. Sedangkan Transfer Keluar sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebesar Rp0.

Per 31 Desember 2024 terdapat Transfer Masuk sebesar Rp65.938.189 dari BPS Provinsi Kalimantan Timur berupa Barang Konsumsi senilai Rp65.938.189. Rincian transfer masuk per 31 Desember 2024 dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 33
Rincian Transfer Masuk Per 31 Desember 2024

Entitas Asal	Jenis	Aset Diterima	Akumulasi Transaksional	Nilai Buku Aset (Rp)
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen Susenas Maret 2024	16.844.800	16.844.800
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Kalender dinding, kalender meja, dan buku kerja	1.608.544	1.608.544
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen SERUTI Triwulan 1 2024	321.925	321.925
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen Survei Konstruksi 2024	196.430	196.430
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen Survei Tahunan Perusahaan Industri Manufaktur 2023 dan Survei Captive Power 2024	95.700	95.700
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen Survei Ekonomi Pertanian UTP 2024	4.938.000	4.938.000
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen Survei IMK 2024	210.000	210.000
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen Sakernas Agustus 2024	3.107.000	3.107.000
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen Susenas MSBP 2024 dan Seruti	6.205.200	6.205.200
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen Seruti Triwulan 4 2024	2.812.000	2.812.000
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen Survei Ubinan 2025	2.516.590	2.516.590
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen Susenas Maret dan Seruti Triwulan 1 2025	21.999.500	21.999.500
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Dokumen Susenas Harga Produsen 2025	2.640.500	2.640.500
BPS Provinsi Kalimantan Timur	Barang Konsumsi	Kalender dinding, kalender meja, dan buku kerja	2.442.000	2.442.000
Jumlah			65.938.189	65.938.189

Ekuitas Akhir
Rp4.736.833.782

E.5 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas pada tanggal 31 Desember 2024 dan 31 Desember 2023 adalah masing-masing sebesar Rp4.736.833.782 dan Rp4.972.554.364.

PENGUNGKAPAN LAINNYA

F.1 Penjelasan Pengelola Anggaran

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bontang Nomor 001/64741/2024 Tentang Pengelola Anggaran Badan Pusat Statistik Kota Bontang Tahun Anggaran 2024 tanggal 2 Januari 2024, pengelola keuangan Badan Pusat Statistik Kota Bontang TA 2024 adalah sebagai berikut.

Kuasa Pengguna Anggaran : Widiyantono, SST., M.Stat.
Pejabat Pembuat Komitmen : Novana Ari Santi, SST.
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : Octarina Nuria Salsabila, S.Tr.Stat.
Bendahara : Ilmiah Sukanthi, SE.

Selanjutnya berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bontang Nomor 006/64741/2024 Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bontang Nomor SK 001/64741/2024 Tentang Pengelola Anggaran Badan Pusat Statistik Kota Bontang Tahun Anggaran 2024 tanggal 6 Mei 2024, ditetapkan penggantian Kuasa Pengguna Anggaran. Per 6 Mei 2024 pengelola keuangan Badan Pusat Statistik Kota Bontang TA 2024 adalah sebagai berikut.

Kuasa Pengguna Anggaran : Ir. Nur Wahid, M.M.
Pejabat Pembuat Komitmen : Novana Ari Santi, SST.
Pejabat Penandatanganan/Penguji SPM : Octarina Nuria Salsabila, S.Tr.Stat.
Bendahara : Ilmiah Sukanthi, SE.

F.2 Penjelasan Pengurus BMN

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pusat Statistik Kota Bontang Nomor 004/64741/2024 Tentang Penunjukan Pengurus/Penyimpan Barang Milik Negara (BMN) pada Badan Pusat Statistik Kota Bontang Tahun Anggaran 2024 tanggal 2 Januari 2024, pengurus/penyimpan BMN Badan Pusat Statistik Kota Bontang TA 2024 adalah sebagai berikut.

Pengurus/ Penyimpan BMN : Ananda Trinita Nurazizah, A.Md.Stat.

F.3 Penjelasan Rekening Bendahara Pengeluaran

BPS Kota Bontang memiliki Rekening Bendahara Pengeluaran BPG 046 BPS KOTA BONTANG di PT. BANK MANDIRI (PERSERO) TBK – KC BONTANG dengan nomor rekening 8100126372371000 berdasarkan persetujuan rekening dari KPPN Samarinda No. S-430/PB.3/2021 tanggal 17 Maret 2021.

F.4 Penjelasan Pengungkapan Lainnya

Berikut merupakan rincian pengungkapan lainnya di BPS Kota Bontang hingga 31 Desember Tahun Anggaran 2024:

- BPS Kota Bontang tidak memiliki kerjasama dengan pihak lain;
- BPS Kota Bontang Tidak memiliki rekening bendahara penerimaan;
- Tidak terdapat rincian uang muka belanja dan pendapatan yang masih harus diterima;
- Tidak terdapat rincian mengenai jalan, irigasi, dan jaringan;
- Tidak terdapat rincian mengenai konstruksi dalam pengerjaan;
- Tidak terdapat rincian mengenai pendapatan yang ditanggihkan;
- Tidak terdapat rincian mengenai pendapatan diterima di muka;
- Tidak terdapat rincian mengenai belanja barang untuk diserahkan kepada masyarakat;
- Tidak memiliki pos luar biasa;
- Tidak terdapat penyesuaian nilai tahun berjalan;
- Tidak terdapat koreksi nilai aset tetap non revaluasi;
- Tidak terdapat koreksi atas beban;
- Tidak terdapat koreksi atas pendapatan;
- Tidak terdapat kejadian penting setelah tanggal neraca;
- Tidak terdapat tindak lanjut pemeriksaan BPK.

F.5 Penjelasan Program Prioritas Nasional

Berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024 yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintahan Tahun 2024, pada Badan Pusat Statistik terdapat terdapat Alokasi Anggaran untuk Prioritas Nasional (PN) yaitu pada Prioritas Nasional (01) Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan dari 7 Prioritas Nasional yang ditetapkan dalam RKP. Rincian Pagu Anggaran, Realisasi Anggaran dan Pencapaian Output dari masing-masing Prioritas Nasional adalah sebagai berikut:

a. Prioritas Nasional I - Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan.

Pelaksanaannya diantaranya melalui 1 (satu) program prioritas yaitu Penguatan Pilar Pertumbuhan dan Daya Saing Ekonomi, dan 1 (satu) kegiatan prioritas yaitu Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data dan Informasi Perkembangan Ekonomi, Terutama Pangan, Kemaritiman, Pariwisata, Ekonomi Kreatif, dan Ekonomi Digital, yang dilaksanakan di Satuan Kerja Badan Pusat Statistik Kota Bontang dengan pagu mencapai Rp786.661.000 dan realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp304.563.558 (38,72 %) dengan rincian sebagai berikut.

Nama Satker	Program/Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
BPS Kota Bontang	Publikasi/ Laporan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi	15.899.000	14.616.000	91,93	Layanan	1	1	100,00

Nama Satker	Program/Kegiatan Prioritas	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Output Strategis	Target	Capaian Output Strategis	%
	Dengan Kerangka Sampel Area							
BPS Kota Bontang	Publikasi/ Laporan Statistik Tanaman Pangan	36.448.000	34.646.999	95,06	Layanan	1	1	100,00
BPS Kota Bontang	Publikasi/Laporan Sensus Pertanian	689.569.000	221.180.559	32,08	Layanan	1	1	100,00
BPS Kota Bontang	Publikasi/ Laporan Statistik E-Commerce	27.346.000	21.463.000	78,49	Layanan	1	1	100,00
BPS Kota Bontang	Publikasi/Laporan Sensus Ekonomi 2026	15.989.000	11.497.000	71,91	Layanan	1	1	100,00
BPS Kota Bontang	Publikasi/Laporan Penyusunan Disagregasi PMTB	1.410.000	1.160.000	82,27	Layanan	1	1	100,00

F.6 Penjelasan Anggaran Tematik

Pada Tahun Anggaran 2024 di BPS Kota Bontang terdapat 1 (satu) RO yang memiliki penanda tematik APBN dengan Tema 03 yaitu Anggaran Responsif Gender (ARG). Pengungkapan ini dirinci sebagai berikut.

a. Anggaran Responsif Gender (ARG)(03)

Pelaksanaannya diantaranya melalui 1 RO yang dilaksanakan di Satuan Kerja Badan Pusat Statistik Kota Bontang dengan pagu mencapai Rp600.000 dan realisasi per 31 Desember 2024 sebesar Rp0 (0%) dengan rincian sebagai berikut.

Nama Satker	RO	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Satuan Rincian Output	Target	Capaian Rincian Output	%	Keterkaitan dengan PN
BPS Kota Bontang	Publikasi/ Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik	600.000	0	0,00	Layanan	1	1	100,00	Bukan Program Prioritas

F.7 Penjelasan Output Strategis

Hingga 31 Desember 2024, output strategis yang telah dicapai oleh BPS Kota Bontang dirinci sebagai berikut.

No	Kode Rincian Output	Uraian Rincian Output	PN/ Tematik (PN xx / T xx)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan (%)	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output (%)
1	994	Layanan Perkantoran	-	3.767.426.000	3.754.441.786	99,66	2 Layanan	2 Layanan	100,00
2	951	Layanan Sarana Internal	-	100.000.000	96.000.000	96,00	1 Paket	1 Paket	100,00
3	952	Layanan Perencanaan dan Penganggaran	-	7.569.000	7569000	100,00	1 Dokumen	1 Dokumen	100,00
4	955	Layanan Manajemen Keuangan	-	11.520.000	11.270.000	97,83	3 Dokumen	3 Dokumen	100,00
5	'007	Publikasi/ Laporan Statistik Tanaman Pangan	PN 01	36.448.000	34.646.999	95,06	1 Layanan	1 Layanan	100,00
6	'010	Publikasi/ Laporan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi Dengan Kerangka Sampel Area	PN 01	15.899.000	14.616.000	91,93	1 Layanan	1 Layanan	100,00
7	956	Layanan BMN	-	3.698.000	2.600.000	70,31	1 Layanan	1 Layanan	100,00
8	962	Layanan Umum	-	7.900.000	5.903.000	74,72	1 Layanan	1 Layanan	100,00
9	'004	Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik	T 03	600.000	0	0,00	1 Layanan	1 Layanan	100,00
10	'003	Laporan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	-	20.430.000	20.400.000	99,85	1 Lembaga	1 Lembaga	100,00
11	'004	Laporan Diseminasi dan Metadata Statistik	-	23.040.000	18.393.294	79,83	1 Layanan	1 Layanan	100,00
12	'007	Publikasi/Laporan Statistik Neraca Pengeluaran	-	36.277.000	35.024.790	96,55	1 Layanan	1 Layanan	100,00
13	'008	Publikasi/Laporan Penyusunan Disagregasi PMTB	PN 01	1.410.000	1160000	82,27	1 Layanan	1 Layanan	100,00
14	'006	Publikasi/Laporan Neraca Produksi	-	33.674.000	20.831.122	61,86	1 Layanan	1 Layanan	100,00
15	'005	Dokumen, Laporan, dan Publikasi Pengembangan	-	283.000	0	0,00	1 Layanan	1 Layanan	100,00

No	Kode Rincian Output	Uraian Rincian Output	PN/ Tematik (PN xx / T xx)	Alokasi Anggaran (Rp)	Realisasi Belanja (Rp)	Persentase Penyerapan (%)	Target Keluaran	Realisasi Volume Keluaran	Progres Capaian Output (%)
		Metodologi Sensus dan Survei							
16	'004	Publikasi/Laporan Statistik Distribusi	-	24.601.000	9.262.713	37,65	1 Layanan	1 Layanan	100,00
17	'006	Publikasi/Laporan Sensus Ekonomi 2026	PN 01	15.989.000	11.497.000	71,91	1 Layanan	1 Layanan	100,00
18	'009	Publikasi/Laporan Statistik Harga	-	71.194.000	44.380.684	62,34	1 Layanan	1 Layanan	100,00
19	'004	Publikasi/Laporan Sakernas	-	165.026.000	162.154.303	98,26	1 Layanan	1 Layanan	100,00
20	'006	Publikasi/Laporan Susenas	-	285.882.000	282.626.160	98,86	1 Layanan	1 Layanan	100,00
21	'006	Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial	-	750.000	0	0,00	1 Layanan	1 Layanan	100,00
22	'008	Publikasi/Laporan Pendataan Podes	-	18.868.000	14.471.120	76,70	1 Layanan	1 Layanan	100,00
23	'004	Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	-	39.728.000	36.129.037	90,94	1 Layanan	1 Layanan	100,00
24	'009	Publikasi/ Laporan Statistik E-Commerce	PN 01	27.346.000	21463000	78,49	1 Layanan	1 Layanan	100,00
25	'005	Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan yang Terbit Tepat Waktu	-	16.992.000	5.200.000	30,60	1 Layanan	1 Layanan	100,00
26	'008	Publikasi/Laporan Statistik Hortikultura Dan Perkebunan	-	51.364.000	8.637.000	16,82	1 Layanan	1 Layanan	100,00
27	'006	Publikasi/Laporan Sensus Pertanian	PN 01	689.569.000	221.180.559	32,08	1 Layanan	1 Layanan	100,00
28	'006	Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Pengalihan, Energi, Dan Konstruksi	-	87.670.000	62.374.486	71,15	1 Layanan	1 Layanan	100,00

F.8 Penjelasan Capaian Rincian Output Menurut Klasifikasi Fungsi

Capaian Rincian Output menurut klasifikasi fungsi yang telah dicapai dalam pelaksanaan APBN TA 2024 pada Badan Pusat Statistik Kota Bontang per 31 Desember 2024 antara lain sebagai berikut:

LAPORAN KINERJA BPS KOTA BONTANG PER 31 DESEMBER 2024 TAHUN ANGGARAN 2024

Kementrian/Lembaga : (054) Badan Pusat Statistik
 Unit Organisasi : (01) Badan Pusat Statistik
 Satuan Kerja : (637237) Badan Pusat Statistik Kota Bontang
 Fungsi : (01) Pelayanan Umum
 Sub Fungsi : (01.01) Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri
 Program : (GG) Program Penyediaan dan Pelayanan Informasi Statistik
 Lokasi : Kota Bontang

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2896	Pengembangan dan Analisis Statistik								
	• Publikasi/Laporan Analisis dan Pengembangan Statistik	600.000	0	0,00	1	1	Layanan	100,00	Ada penghematan anggaran, namun realisasi RO telah tercapai
2897	Pelayanan dan Pengembangan Diseminasi Informasi Statistik								
	• Laporan Penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	20.430.000	20.400.000	99,85	1	1	Lembaga	100,00	Ada penghematan anggaran, namun realisasi RO telah tercapai
	• Laporan Diseminasi dan Metadata Statistik	23.040.000	18.393.294	79,83	1	1	Layanan	100,00	Ada penghematan anggaran, namun realisasi RO telah tercapai
2898	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Pengeluaran								
	• Publikasi/Laporan Statistik Neraca Pengeluaran	36.277.000	35.024.790	96,55	1	1	Layanan	100,00	Sudah dilaksanakan
	• Publikasi/Laporan Penyusunan	1.410.000	1160000	82,27	1	1	Layanan	100,00	Ada penghematan anggaran,

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
	Disagregasi PMTB								namun realisasi RO telah tercapai
2899	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Neraca Produksi								
	• Publikasi/Laporan Neraca Produksi	33.674.000	20.831.122	61,86	1	1	Layanan	100,00	Sudah dilaksanakan
2900	Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei								
	• Dokumen, Laporan, dan Publikasi Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei	283.000	0	0,00	1	1	Layanan	100,00	Ada penghematan anggaran, namun realisasi RO telah tercapai
2902	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Distribusi								
	• Publikasi/Laporan Statistik Distribusi	24.601.000	9.262.713	37,65	1	1	Layanan	100,00	Ada penghematan anggaran, namun realisasi RO telah tercapai
	• Publikasi/Laporan Sensus Ekonomi 2026	15.989.000	11.497.000	71,91	1	1	Layanan	100,00	Ada penghematan anggaran, namun realisasi RO telah tercapai
2903	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Harga								
	• Publikasi/Laporan Statistik Harga	71.194.000	44.380.684	62,34	1	1	Layanan	100,00	Ada penghematan anggaran, namun realisasi RO telah tercapai
2904	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi								
	• Publikasi/Laporan Statistik Industri, Pertambangan dan Penggalian, Energi, dan Konstruksi	87.670.000	62.374.486	71,15	1	1	Layanan	100,00	Ada penghematan anggaran, namun realisasi RO telah tercapai
2905	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kependudukan dan Ketenagakerjaan								
	• Publikasi/Laporan Sakernas	165.026.000	162.154.303	98,26	1	1	Layanan	100,00	Ada penghematan anggaran,

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									namun realisasi RO telah tercapai
2906	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Kesejahteraan Rakyat								
	• Publikasi/Laporan Susenas	285.882.000	282.626.160	98,86	1	1	Layanan	100,00	Sudah dilaksanakan
2907	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Ketahanan Sosial								
	• Publikasi/Laporan Statistik Ketahanan Sosial	750.000	0	0,00	1	1	Layanan	100,00	Sudah dilaksanakan
	• Publikasi/Laporan Pendataan Podes	18.868.000	14.471.120	76,70	1	1	Layanan	100,00	Ada penghematan anggaran, namun realisasi RO telah tercapai
2908	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata								
	• Publikasi/Laporan Statistik Keuangan, Teknologi Informasi, dan Pariwisata	39.728.000	36.129.037	90,94	1	1	Layanan	100,00	Ada penghematan anggaran, namun realisasi RO telah tercapai
	• Publikasi/Laporan Statistik E-Commerce	27.346.000	21463000	78,49	1	1	Layanan	100,00	Sudah dilaksanakan
2909	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan								
	• Publikasi/Laporan Statistik Peternakan, Perikanan, dan Kehutanan Yang Terbit Tepat Waktu	16.992.000	5.200.000	30,60	1	1	Layanan	100,00	Ada penghematan anggaran, namun realisasi RO telah tercapai
2910	Penyediaan dan Pengembangan Statistik Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan								
	• Publikasi/Laporan Sensus Pertanian	689.569.000	221.180.559	32,08	1	1	Layanan	100,00	Ada penghematan anggaran, namun realisasi RO telah tercapai
	• Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan	36.448.000	34.646.999	95,06	1	1	Layanan	100,00	Ada penghematan anggaran,

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
									namun realisasi RO telah tercapai
	<ul style="list-style-type: none"> Publikasi/Laporan Statistik Hortikultura dan Perkebunan 	51.364.000	8.637.000	16,82	1	1	Layanan	100,00	Ada penghematan anggaran, namun realisasi RO telah tercapai
	<ul style="list-style-type: none"> Publikasi/Laporan Statistik Tanaman Pangan Terintegrasi Dengan Kerangka Sampel Area 	15.899.000	14.616.000	91,93	1	1	Layanan	100,00	Ada penghematan anggaran, namun realisasi RO telah tercapai

Kementrian/Lembaga : (054) Badan Pusat Statistik
 Unit Organisasi : (01) Badan Pusat Statistik
 Satuan Kerja : (637237) Badan Pusat Statistik Kota Bontang
 Fungsi : (01) Pelayanan Umum
 Sub Fungsi : (01.01) Lembaga Eksekutif dan Legislatif, Masalah Keuangan dan Fiskal, serta Urusan Luar Negeri

 Program : (WA) Program Dukungan Manajemen
 Lokasi : Kota Bontang

Kode	Kegiatan	Belanja			Keluaran				Keterangan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%	Target	Realisasi	Satuan	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
2886	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya BPS Provinsi								
	• Layanan Sarana Internal	100.000.000	96.000.000	96,00	1	1	Paket	100,00	Sudah dilaksanakan
	• Layanan Perencanaan dan Penganggaran	7.569.000	7569000	100,00	1	1	Dokumen	100,00	Sudah dilaksanakan
	• Layanan Manajemen Keuangan	11.520.000	11.270.000	97,83	3	3	Dokumen	100,00	Sudah dilaksanakan
	• Layanan BMN	3.698.000	2.600.000	70,31	1	1	Layanan	100,00	Sudah dilaksanakan
	• Layanan Umum	7.900.000	5.903.000	74,72	1	1	Layanan	100,00	Ada penghematan anggaran, namun realisasi RO telah tercapai
	• Layanan Perkantoran	3.767.426.000	3.754.441.786	99,66	2	2	Layanan	100,00	Sudah dilaksanakan

F.9 Penjelasan Historis Revisi DIPA

DIPA Awal BPS Kota Bontang dengan Nomor: SP DIPA-054.01.2.637237/2024 tanggal 24 November 2023 dengan nomor Digital Stamp (DS): 7172-0087-2946-1659 dengan total nilai pagu anggaran Rp5.486.657.000 (lima miliar empat ratus delapan puluh enam juta enam ratus lima puluh tujuh ribu rupiah). Per 31 Desember 2024, BPS Kota Bontang telah melakukan 11 (sebelas) kali revisi anggaran sebagai berikut:

- a. Revisi ke-1 dilakukan melalui DJA berdasarkan Surat SESTAMA No. B-7/02000/PR.440/2024 dalam rangka *Automatic Adjustment* TA 2024.

KODE	DESKRIPSI	SEMULA	MENJADI	SELISIH
2896.BMA	Data dan Informasi Publik	3.000.000	3.000.000	-
2897.DBD	Data dan Informasi Publik	20.430.000	20.430.000	-
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	24.196.000	24.196.000	-
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	46.488.000	46.488.000	-
2898.QMA	Data dan Informasi Publik	1.410.000	1.410.000	-
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	20.078.000	20.078.000	-
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	566.000	566.000	-
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	22.451.000	22.451.000	-
2902.QMA	Data dan Informasi Publik	15.352.000	15.352.000	-
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	71.041.000	71.041.000	-
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	57.011.000	57.011.000	-
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	174.596.000	174.596.000	-
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	369.816.000	369.816.000	-
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	22.734.000	22.734.000	-
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	36.841.000	36.841.000	-
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	3.389.000	3.389.000	-
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	36.241.000	36.241.000	-
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	846.638.000	846.638.000	-
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.695.290.000	3.695.290.000	-
2886.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	19.089.000	19.089.000	-
Total		5.486.657.000	5.486.657.000	-

b. Revisi ke-2 dilakukan melalui kanwil DJPB dalam rangka Pemutakhiran Hal 3 DIPA.

KODE	DESKRIPSI	SEMULA	MENJADI	SELISIH
2896.BMA	Data dan Informasi Publik	3.000.000	3.000.000	-
2897.DBD	Data dan Informasi Publik	20.430.000	20.430.000	-
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	24.196.000	24.196.000	-
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	46.488.000	46.488.000	-
2898.QMA	Data dan Informasi Publik	1.410.000	1.410.000	-
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	20.078.000	20.078.000	-
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	566.000	566.000	-
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	22.451.000	22.451.000	-
2902.QMA	Data dan Informasi Publik	15.352.000	15.352.000	-
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	71.041.000	71.041.000	-
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	57.011.000	57.011.000	-
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	174.596.000	174.596.000	-
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	369.816.000	369.816.000	-
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	22.734.000	22.734.000	-
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	36.841.000	36.841.000	-
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	3.389.000	3.389.000	-
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	36.241.000	36.241.000	-
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	846.638.000	846.638.000	-
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.695.290.000	3.695.290.000	-
2886.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	19.089.000	19.089.000	-
Total		5.486.657.000	5.486.657.000	-

- c. Revisi ke-3 dilakukan melalui DJA sesuai surat Sestama No. B-151/02000/PR.440/2024 dalam rangka Revisi DIPA triwulan I TA 2024 dengan adanya penyesuaian teknis dan non teknis pada Program Dukman serta PPIS TA 2024. Revisi DIPA antar Satker di wilayah Kalimantan Timur untuk belanja pegawai dan kegiatan ICP.

KODE	DESKRIPSI	SEMULA	MENJADI	SELISIH
2896.BMA	Data dan Informasi Publik	3.000.000	3.000.000	-
2897.DBD	Data dan Informasi Publik	20.430.000	20.430.000	-
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	24.196.000	24.196.000	-
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	46.488.000	42.748.000	-3.740.000
2898.QMA	Data dan Informasi Publik	1.410.000	1.410.000	-
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	20.078.000	19.970.000	-108.000
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	566.000	566.000	-
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	22.451.000	22.552.000	101.000
2902.QMA	Data dan Informasi Publik	15.352.000	15.352.000	-
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	71.041.000	68.206.000	-2.835.000
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	57.011.000	57.011.000	-
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	174.596.000	160.493.000	-14.103.000
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	369.816.000	338.861.000	-30.955.000
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	22.734.000	21.322.000	-1.412.000
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	36.841.000	36.078.000	-763.000
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	3.389.000	3.389.000	-
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	36.241.000	36.241.000	-
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	846.638.000	846.638.000	-
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.695.290.000	4.005.428.000	310.138.000
2886.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	19.089.000	19.089.000	-
Total		5.486.657.000	5.742.980.000	256.323.000

- d. Revisi ke-4 dilakukan melalui Kanwil DJPB dalam rangka Revisi POK dan pemutakhiran Hal 3 DIPA.

KODE	DESKRIPSI	SEMULA	MENJADI	SELISIH
2896.BMA	Data dan Informasi Publik	3.000.000	3.000.000	-
2897.DBK	Data dan Informasi Publik	20.430.000	20.430.000	-
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	24.196.000	24.196.000	-
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	42.748.000	42.748.000	-
2898.QMA	Data dan Informasi Publik	1.410.000	1.410.000	-
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	19.970.000	19.970.000	-
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	566.000	566.000	-
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	22.552.000	22.552.000	-
2902.QMA	Data dan Informasi Publik	15.352.000	15.352.000	-
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	68.206.000	68.206.000	-
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	57.011.000	57.011.000	-
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	160.493.000	160.493.000	-
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	338.861.000	338.861.000	-
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	21.322.000	21.322.000	-
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	36.078.000	36.078.000	-
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	3.389.000	3.389.000	-
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	36.241.000	36.241.000	-
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	846.638.000	846.638.000	-
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4.005.428.000	4.005.428.000	-
2886.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	19.089.000	19.089.000	-
Total		5.742.980.000	5.742.980.000	-

- e. Revisi ke-5 dilakukan melalui Kanwil DJPB dalam rangka Revisi POK dan Pemutakhiran Hal 3 DIPA.

KODE	DESKRIPSI	SEMULA	MENJADI	SELISIH
2896.BMA	Data dan Informasi Publik	3.000.000	3.000.000	-
2897.DBD	Data dan Informasi Publik	20.430.000	20.430.000	-
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	24.196.000	24.196.000	-
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	42.748.000	42.748.000	-
2898.QMA	Data dan Informasi Publik	1.410.000	1.410.000	-
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	19.970.000	19.970.000	-
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	566.000	566.000	-
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	22.552.000	22.552.000	-
2902.QMA	Data dan Informasi Publik	15.352.000	15.352.000	-
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	68.206.000	68.206.000	-
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	57.011.000	57.011.000	-
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	160.493.000	160.493.000	-
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	338.861.000	338.861.000	-
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	21.322.000	21.322.000	-
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	36.078.000	36.078.000	-
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	3.389.000	3.389.000	-
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	36.241.000	36.241.000	-
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	846.638.000	846.638.000	-
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4.005.428.000	4.005.428.000	-
2886.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	19.089.000	19.089.000	-
Total		5.742.980.000	5.742.980.000	-

- f. Revisi ke-6 dilakukan melalui DJA dalam rangka Revisi DIPA Bulan Juli TA 2024 sesuai Surat Plt. Sekretaris Utama BPS Nomor B-532/02000/PR.450/2024.

KODE	DESKRIPSI	SEMULA	MENJADI	SELISIH
2896.BMA	Data dan Informasi Publik	3.000.000	600.000	-2.400.000
2897.DBD	Data dan Informasi Publik	20.430.000	20.430.000	-
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	24.196.000	24.196.000	-
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	42.748.000	37.356.000	-5.392.000
2898.QMA	Data dan Informasi Publik	1.410.000	1.410.000	-
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	19.970.000	24.804.000	4.834.000
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	566.000	283.000	-283.000
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	22.552.000	23.602.000	1.050.000
2902.QMA	Data dan Informasi Publik	15.352.000	15.989.000	637.000
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	68.206.000	69.899.000	1.693.000
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	57.011.000	57.175.000	164.000
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	160.493.000	164.378.000	3.885.000
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	338.861.000	362.423.000	23.562.000
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	21.322.000	19.204.000	-2.118.000
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	36.078.000	39.872.000	3.794.000
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	3.389.000	3.389.000	-
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	36.241.000	35.863.000	-378.000
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	846.638.000	792.816.000	-53.822.000
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4.005.428.000	4.025.146.000	19.718.000
2886.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	19.089.000	19.089.000	-
Total		5.742.980.000	5.737.924.000	-5.056.000

- g. Revisi ke-7 dilakukan melalui DJA dalam rangka adanya penyesuaian kegiatan Badan Pusat Statistik TA 2024 sesuai Surat Sekretaris Utama BPS Nomor B-699/02000/PR.440/2024.

KODE	DESKRIPSI	SEMULA	MENJADI	SELISIH
2896.BMA	Data dan Informasi Publik	600.000	600.000	-
2897.DBD	Data dan Informasi Publik	20.430.000	20.430.000	-
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	24.196.000	23.040.000	-1.156.000
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	37.356.000	36.277.000	-1.079.000
2898.QMA	Data dan Informasi Publik	1.410.000	1.410.000	-
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	24.804.000	33.674.000	8.870.000
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	283.000	283.000	-
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	23.602.000	24.601.000	999.000
2902.QMA	Data dan Informasi Publik	15.989.000	15.989.000	-
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	69.899.000	71.194.000	1.295.000
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	57.175.000	87.670.000	30.495.000
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	164.378.000	165.026.000	648.000
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	362.423.000	285.882.000	-76.541.000
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	19.204.000	19.618.000	414.000
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	39.872.000	39.728.000	-144.000
2908.QMA	Data dan Informasi Publik	-	27.346.000	27.346.000
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	3.389.000	16.992.000	13.603.000
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	35.863.000	51.364.000	15.501.000
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	792.816.000	741.916.000	-50.900.000
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4.025.146.000	4.025.146.000	-
2886.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	19.089.000	19.089.000	-
Total		5.737.924.000	5.707.275.000	-30.649.000

h. Revisi ke-8 dilakukan melalui Kanwil DJPB dalam rangka penyesuaian Hal 3 DIPA.

KODE	DESKRIPSI	SEMULA	MENJADI	SELISIH
2896.BMA	Data dan Informasi Publik	600.000	600.000	-
2897.DBD	Data dan Informasi Publik	20.430.000	20.430.000	-
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	23.040.000	23.040.000	-
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	36.277.000	36.277.000	-
2898.QMA	Data dan Informasi Publik	1.410.000	1.410.000	-
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	33.674.000	33.674.000	-
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	283.000	283.000	-
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	24.601.000	24.601.000	-
2902.QMA	Data dan Informasi Publik	15.989.000	15.989.000	-
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	71.194.000	71.194.000	-
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	87.670.000	87.670.000	-
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	165.026.000	165.026.000	-
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	285.882.000	285.882.000	-
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	19.618.000	19.618.000	-
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	39.728.000	39.728.000	-
2908.QMA	Data dan Informasi Publik	27.346.000	27.346.000	-
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	16.992.000	16.992.000	-
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	51.364.000	51.364.000	-
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	741.916.000	741.916.000	-
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	4.025.146.000	4.025.146.000	-
2886.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	19.089.000	19.089.000	-
Total		5.707.275.000	5.707.275.000	-

- i. Revisi ke-9 dilakukan melalui DJA dalam rangka adanya penyesuaian kegiatan Badan Pusat Statistik TA 2024 sesuai Surat Sekretaris Utama Nomor B-860/02000/PR.450/2024.

KODE	DESKRIPSI	SEMULA	MENJADI	SELISIH
2896.BMA	Data dan Informasi Publik	600.000	600.000	-
2897.DBD	Data dan Informasi Publik	20.430.000	20.430.000	-
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	23.040.000	23.040.000	-
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	36.277.000	36.277.000	-
2898.QMA	Data dan Informasi Publik	1.410.000	1.410.000	-
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	33.674.000	33.674.000	-
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	283.000	283.000	-
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	24.601.000	24.601.000	-
2902.QMA	Data dan Informasi Publik	15.989.000	15.989.000	-
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	71.194.000	71.194.000	-
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	87.670.000	87.670.000	-
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	165.026.000	165.026.000	-
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	285.882.000	285.882.000	-
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	19.618.000	19.618.000	-
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	39.728.000	39.728.000	-
2908.QMA	Data dan Informasi Publik	27.346.000	27.346.000	-
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	16.992.000	16.992.000	-
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	51.364.000	51.364.000	-
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	741.916.000	741.916.000	-
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.779.024.000	3.779.024.000	-
2886.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	100.000.000	100.000.000	-
2886.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	19.089.000	19.089.000	-
Total		5.561.153.000	5.561.153.000	-

- j. Revisi ke-10 dilakukan melalui DJPB dalam rangka adanya penyesuaian Anggaran dan Hal 3 DIPA.

KODE	DESKRIPSI	SEMULA	MENJADI	SELISIH
2896.BMA	Data dan Informasi Publik	600.000	600.000	-
2897.DBD	Data dan Informasi Publik	20.430.000	20.430.000	-
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	23.040.000	23.040.000	-
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	36.277.000	36.277.000	-
2898.QMA	Data dan Informasi Publik	1.410.000	1.410.000	-
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	33.674.000	33.674.000	-
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	283.000	283.000	-
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	24.601.000	24.601.000	-
2902.QMA	Data dan Informasi Publik	15.989.000	15.989.000	-
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	71.194.000	71.194.000	-
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	87.670.000	87.670.000	-
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	165.026.000	165.026.000	-
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	285.882.000	285.882.000	-
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	19.618.000	19.618.000	-
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	39.728.000	39.728.000	-
2908.QMA	Data dan Informasi Publik	27.346.000	27.346.000	-
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	16.992.000	16.992.000	-
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	51.364.000	51.364.000	-
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	741.916.000	741.916.000	-
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.779.024.000	3.779.024.000	-
2886.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	100.000.000	100.000.000	-
2886.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	19.089.000	19.089.000	-
Total		5.561.153.000	5.561.153.000	-

- k. Revisi ke-11 dilakukan melalui melalui DJPB dalam rangka adanya penyesuaian Anggaran dan Hal 3 DIPA.

KODE	DESKRIPSI	SEMULA	MENJADI	SELISIH
2896.BMA	Data dan Informasi Publik	600.000	600.000	-
2897.DBD	Data dan Informasi Publik	20.430.000	20.430.000	-
2897.BMA	Data dan Informasi Publik	23.040.000	23.040.000	-
2898.BMA	Data dan Informasi Publik	36.277.000	36.277.000	-
2898.QMA	Data dan Informasi Publik	1.410.000	1.410.000	-
2899.BMA	Data dan Informasi Publik	33.674.000	33.674.000	-
2900.BMA	Data dan Informasi Publik	283.000	283.000	-
2902.BMA	Data dan Informasi Publik	24.601.000	24.601.000	-
2902.QMA	Data dan Informasi Publik	15.989.000	15.989.000	-
2903.BMA	Data dan Informasi Publik	71.194.000	71.194.000	-
2904.BMA	Data dan Informasi Publik	87.670.000	87.670.000	-
2905.BMA	Data dan Informasi Publik	165.026.000	165.026.000	-
2906.BMA	Data dan Informasi Publik	285.882.000	285.882.000	-
2907.BMA	Data dan Informasi Publik	19.618.000	19.618.000	-
2908.BMA	Data dan Informasi Publik	39.728.000	39.728.000	-
2908.QMA	Data dan Informasi Publik	27.346.000	27.346.000	-
2909.BMA	Data dan Informasi Publik	16.992.000	16.992.000	-
2910.BMA	Data dan Informasi Publik	51.364.000	51.364.000	-
2910.QMA	Data dan Informasi Publik	741.916.000	741.916.000	-
2886.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	3.779.024.000	3.779.024.000	-
2886.EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	100.000.000	100.000.000	-
2886.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	19.089.000	19.089.000	-
Total		5.561.153.000	5.561.153.000	-